

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA
HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT KURANG MAMPU DI KECAMATAN LIBURENG
KABUPATEN BONE**



Oleh :

HASTUTI

Nomor Induk Mahasiswa :1056111521

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2025

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA
HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT KURANG MAMPU DI KECAMATAN LIBURENG**

KABUPATEN BONE

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan untuk memperoleh Gelar
Sarjana Administrasi Publik (S.AP)

Disusun dan diajukan oleh :

HASTUTI

Nomor Induk Mahasiswa : 105611115521

Kepada :

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Penelitian : Efektivitas Program Bantuan Sosial
Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Kurang Mampu Di Kecamatan Libureng
Kabupaten Bone.
Nama Mahasiswa : Hastuti
Nomor Induk Mahasiswa : 105611115521
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Muthlis Madani, M.Si


Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP

Mengetahui

Dekan

Ketua Program Studi


Dr. Hj Ihyani Malik S.Sos., M.Si
NBM : 991742


Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si
NBM : 730727

Halaman Penerimaan TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor 0341/FSP/A.4-II/1/46/2025 sebagai salah satu syarat memperoleh gelas sarjana Strata I (S1) dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Sabtu, 11 Januari 2025.

Mengetahui:

Dekan

Sekretaris

Dr. Hj. Ihvani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730727

Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si
NBM: 992797

TIM PENGUJI:

1. Dr. H. Muhammadiyah, MM ()
2. Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si ()
3. Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP ()
4. Muhammad Amril P, S.IP., M.AP ()

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Hastuti

Nomor Induk Mahasiwa :105611115521

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menegaskan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri dan tidak diambil dari sumber lain. Saya telah membuat pernyataan ini dengan benar, dan saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan aturan Universitas Muhammadiyah Makassar jika pernyataan ini dikemudian hari tidak benar.

Makassar , 11 januari 2025

Yang Menyatakan,

HASTUTI

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KURANG MAMPU DI KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE

Hastuti, Muhlis Madani, Nurbiah Tahir

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program bantuan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskripsi kualitatif. Informan dalam penelitian meliputi masyarakat penerima manfaat, pendamping atau fasilitator program bantuan sosial, serta staf atau petugas di Dinas Sosial yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk memastikan keabsahan data, dilakukan triangulasi teknik, waktu, dan sumber dengan member check sebagai salah satu metode verifikasi. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bantuan sosial di Kecamatan Libureng memberikan dampak positif yang signifikan dalam membantu masyarakat kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan, sekaligus meringankan beban ekonomi mereka. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala utama yang memengaruhi efektivitas program. Tantangan seperti keterlambatan distribusi bantuan, ketidaktepatan sasaran, dan kurangnya akurasi data penerima menjadi hambatan yang perlu diatasi. Masalah-masalah ini sering kali disebabkan oleh sistem pendataan yang tidak mutakhir dan koordinasi antarinstansi yang kurang optimal. Meski begitu, secara keseluruhan, program ini dianggap berhasil dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat kurang mampu dan memberikan perubahan nyata dalam kualitas hidup mereka. Dampak positif lainnya mencakup peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak penerima manfaat serta pengurangan beban ekonomi rumah tangga. Selain itu, terdapat potensi besar untuk meningkatkan keberlanjutan program dengan memperbaiki sistem pendataan berbasis teknologi real-time dan memperkuat koordinasi antarinstansi yang terlibat. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya edukasi masyarakat tentang penggunaan bantuan sosial agar manfaatnya lebih optimal.

KATA KUNCI : Efektivitas, bantuan sosial, Kesejahteraan masyarakat

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF THE HOPE FAMILY PROGRAM (PKH) SOCIAL ASSISTANCE PROGRAM IN IMPROVING THE WELFARE OF UNDERSTANDING COMMUNITIES IN LIBURENG DISTRICT, BONE REGENCY

Hastuti, Muhlis Madani, Nurbiah Tahir

This research aims to determine the effectiveness of social assistance programs in improving the welfare of underprivileged communities in Libureng District, Bone Regency. This type of research is qualitative research with a qualitative description approach. Informants in the research included beneficiary communities, companions or facilitators of social assistance programs, as well as staff or officers at the Social Service who were selected through purposive sampling techniques. Data collection was carried out using observation, interview and documentation techniques. To ensure the validity of the data, triangulation of techniques, time and sources was carried out with member checking as one of the verification methods. Data analysis was carried out through three main stages: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research results show that the social assistance program in Libureng District has had a significant positive impact in helping underprivileged communities fulfill basic needs such as food, education and health, while also easing their economic burden. However, this research also found several main obstacles that influenced the program's effectiveness. Challenges such as delays in aid distribution, inaccurate targeting, and lack of accurate recipient data are obstacles that need to be overcome. These problems are often caused by data collection systems that are not up to date and less than optimal coordination between agencies. However, overall, this program is considered successful in meeting the basic needs of underprivileged people and providing real changes in their quality of life. Other positive impacts include increasing access to education for beneficiary children and reducing the economic burden on households. In addition, there is great potential to increase program sustainability by improving the real-time technology-based data collection system and strengthening coordination between the agencies involved. This research also highlights the importance of educating the public about the use of social assistance so that the benefits are more optimal

Keywords: *Effectiveness, social assistance, community welfare*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Administrasi Negara dengan judul “EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KURANG MAMPU DI KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE.” Berbagai kendala yang dihadapi penulis dalam penyelesaian skripsi ini dijadikan proses pembelajaran dan pengalaman.

Pada kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara materi maupun non materi :

1. Kepada Pintu surgaku, ibunda tercinta malang Dan cinta pertamaku, ayah tercinta nurdin terimakasih atas segala pengorbanan dan ketulusan kasih yang tiada henti yang diberikan, serta telah mendidik, membesarkan, menyayangi. Mereka sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, mereka memang tidak sempat merasakan pendidikan, tapi semangat motivasi serta doa yang selalu mereka berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai akhir.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si selaku pembimbing I, dan Ibu Nurbiah Tahir, S. Sos., M.AP selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan mulai dari penyusunan proposal hingga penyelesaian skripsi ini

3. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Nur Wahid, S. Sos., M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Bapak dan Ibu dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan, serta staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Bapak Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial beserta seluruh staf atas bantuannya selama penulis melakukan penelitian di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bone.
7. Masyarakat Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, yang telah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.
8. Kepada seseorang yang juga penting kehadirannya, inisial i terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya dan telah menjadi tempat berkeluh kesah, selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Dan terakhir, untuk diri saya sendiri. Hastuti, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Apresiasi sebesar - besarnya karena telah bertanggung jawab menyelesaikan apa yang telah dimulai, Terima kasih telah memilih untuk selalu kuat dan berusaha sampai titik ini.

Semoga segala bantuan, doa, dan dukungan yang diberikan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT.

Makassar, 11 januari 2025

Hastuti

DAFTAR ISI

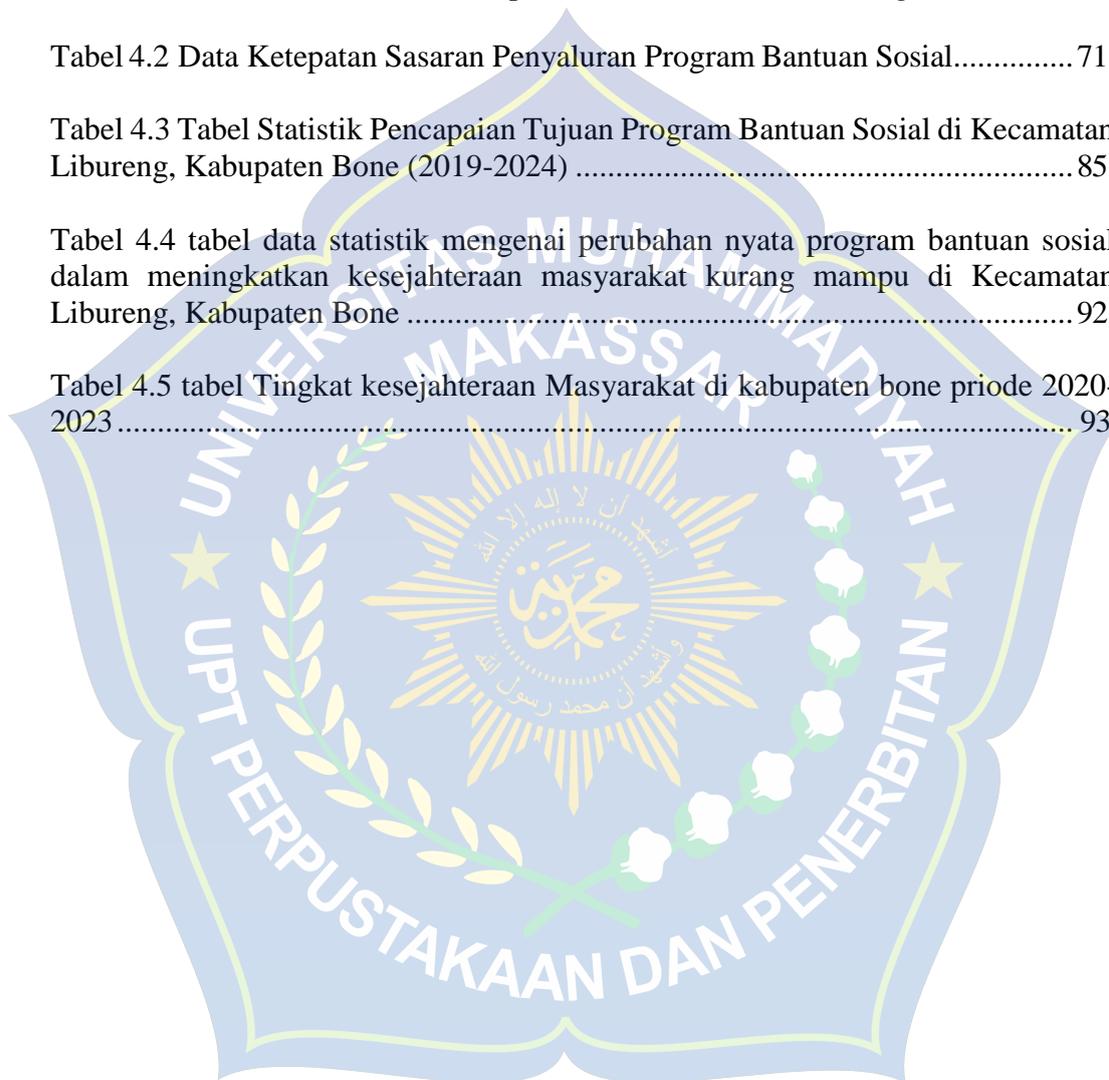
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian terdahulu.....	10
B. Konsep Dan Teori.....	14
C. Kerangka Pikir.....	35
D. Fokus Penelitian.....	37
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	43
B. Jenis Dan Tipe Penelitian.....	43
C. Sumber Data.....	44
D. Informan Penelitian.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Teknik Analisis Data.....	46
G. Pengabsahan Data.....	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	49

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	49
B. Hasil Penelitian	60
C. Pembahasan.....	95
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	109
A. Kesimpulan	112
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN	119



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Informan.....	45
Tabel 4.1 Penerima PKH di Beberapa Desa di Kecamatan libureng.....	50
Tabel 4.2 Data Ketepatan Sasaran Penyaluran Program Bantuan Sosial.....	71
Tabel 4.3 Tabel Statistik Pencapaian Tujuan Program Bantuan Sosial di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone (2019-2024)	85
Tabel 4.4 tabel data statistik mengenai perubahan nyata program bantuan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone	92
Tabel 4.5 tabel Tingkat kesejahteraan Masyarakat di kabupaten bone priode 2020-2023	93



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Vos Viewer.....	10
Gambar 2.2 Bagan Kerangka Pikir.....	37
Gambar 4 1. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bone	59



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memenuhi kebutuhan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang penting bagi perkembangan, Sebab kemiskinan merupakan permasalahan yang tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan kebutuhan hidup. pemerintah harus memperhatikan masalah kemiskinan saat ini Menciptakan kesejahteraan sosial, Pemerintah pusat dan daerah menaruh perhatian besar kemiskinan. Tingginya angka kemiskinan menjadi salah satu faktor penyebabnya Tertinggal dan menghambat kemajuan Negara (Khoerunisa et al., 2023)

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang dihadapi oleh semua negara, termasuk Indonesia, Jadi semua orang harus segera mengatasi masalah ini. Meskipun ada masalah yang berbeda, tidak Tidak ada negara yang bisa mengatasi kemiskinan (N Mustari 2019). Semua negara di dunia menyetujui hal ini Kemiskinan merupakan permasalahan sosial dan kemanusiaan yang menghambat kesejahteraan masyarakat, dan hal ini memang seharusnya terjadi. Perlakukan mereka secara efektif Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak berada. Mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara memadai, seperti kurangnya pendapatan, keterampilan, kondisi kesehatan, penguasaan aset ekonomi, atau akses terhadap informasi. Kualitas hidup Masyarakat rendah juga merupakan tanda masalah kemiskinan. (Azzahra et al., 2024).

Berdasarkan BPS (2024) persentase penduduk miskin di Indonesia tahun 2024 sebanyak 9,03 persen, jumlah penduduk miskin sebesar 25,22 juta orang,

persentase penduduk miskin perkotaan sebesar 7,09 persen, sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan sebesar 11,79 persen. Garis Kemiskinan tercatat sebesar Rp582.932,-/kapita/bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp433.906,- (74,44 persen) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp149.026,- (25,56 persen). Rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,78 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnyagaris kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp2.786.415,-/rumah tangga miskin/bulan (BPS, 2024).

Negara berkewajiban menjamin kesejahteraan setiap penduduknya, dan setiap penduduk berhak memperoleh pelayanan sosial. Kesejahteraan penduduk mempunyai dampak besar terhadap sistem politik, perekonomian, dan lain-lain. Tingkat kesejahteraan penduduk suatu negara menunjukkan sejauh mana keberhasilan negara tersebut dalam mencapai tujuannya. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk, pemerintah melaksanakan berbagai program bantuan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. (Fardi et al., 2023)

Pada awalnya program bantuan sosial (bansos) diciptakan untuk menanggulangi dampak krisis ekonomi, rawan pangan, berkurangnya kesempatan kerja, berkurangnya penyediaan fasilitas sosial bidang kesehatan dan pendidikan, dan menurunnya ekonomi masyarakat (N Tahir 2022). Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau

kesejahteraan masyarakat.

Bantuan sosial (bansos) ialah pemberian santunan berbentuk donasi atau barang baik dari pemerintah maupun suatu lembaga kepada perorangan, keluarga, komunitas, dan rakyat umum yang sifatnya tidak selamanya serta selektif dengan tujuan untuk menyelamatkan dari kemungkinan terjadinya ancaman sosial (Noerkaisar, 2021). Bantuan sosial yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat prasejahtera merupakan bantuan sementara atau tidak bersifat terus menerus. Bantuan yang diberikan bertujuan agar masyarakat prasejahtera tersebut mampu mencukupi kehidupannya secara seimbang (Kementerian Sosial, 2011).

Sejalan dengan hal tersebut Peraturan Menteri Keuangan (2015) menjelaskan bahwa bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan ekonomi dan/atau kesejahteraan Masyarakat (Rusliadi 2022).

Di Indonesia, konsep tentang jaminan sosial telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Bab XIV dengan judul Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, yang terdiri dari dua pasal, yaitu Pasal 33 dan Pasal 34. Pasal 33 lebih menekankan pada Perekonomian Nasional, sedangkan Pasal 34 lebih menekankan pada kesejahteraan Sosial. Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa "fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara". Kemudian dalam Pasal 34 ayat (2) dinyatakan bahwa: " Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak

mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. (Yusuf et al., 2020)

Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementrian Negara/Lembaga. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjasinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat diberikan secara langsung kepada masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan, sifatnya tidak terus menerus dan selektif. Sifat bantuan sosial bisa dengan syarat atau tanpa syarat. Dari segi durasinya, bantuan sosial dapat bersifat sementara bagi korban bencana, atau bersifat tetap bagi penyandang cacat, dan dapat berupa uang atau barang. (Luthfi, 2019)

(karlina nina et al., 2022) memaparkan bahwasannya kebijakan bantuan sosial menjadi salah satu bentuk nyata tanggung jawab pemerintah baik pusat maupun daerah terhadap kondisi rakyatnya yang prasejahtera dan terabaikan di tingkat terendah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, pemberian bantuan sosial memiliki standar ketetapan. Pemerintah daerah di perbolehkan memberi bantuan sosial untuk penduduk atau kelompok masyarakat setara dengan kemampuan keuangan daerah. Penduduk atau kelompok masyarakat tersebut meliputi (a)perorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami situasi yang tidak solid dampak dari kemelut sosial, ekonomi, politik, bencana,

atau fenomena alam agar mampu mencukupi kebutuhan hidup minimum, (b) organisasi bukan pemerintah sektor pendidikan, keagamaan, dan sektor lainnya yang bertindak untuk mengayomi perorangan, kelompok, dan/atau masyarakat dari peluang terjadinya ancaman sosial. (Noerkaisar, 2021)

Menurut BPS (2024) tingkat kemiskinan Sulawesi Selatan masih menunjukkan pencapaian yang belum optimal bila dilihat secara relatif dengan beberapa provinsi yang setara lainnya di Indonesia. Secara relatif tingkat kemiskinan Sulawesi Selatan pada tahun 2024 sebesar 736,48 ribu orang. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Bone pada Maret 2024 adalah sebesar 9,58 persen, turun 0,95 persen poin dibandingkan Maret 2023. Angka 9,58 persen ini berarti diantara 100 penduduk Kabupaten Bone pada kondisi tahun 2024, terdapat 9 sampai 10 orang yang tergolong sebagai penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Bone sebanyak 73,03 ribu orang, berkurang sebanyak 7,09 ribu orang dari tahun sebelumnya. Angka kemiskinan ini menjadi angka terendah selama lima tahun terakhir (BPS, 2024).

Berdasarkan data yang diperoleh pada bulan maret 2022 bahwa Desa Libureng berjumlah 3.519 penduduk dengan jumlah 1.092 kepala keluarga dan luas wilayah 20,24 km², penduduk pendatang sebanyak 31 orang, penduduk pindah sebanyak 31 orang, penduduk meninggal sebanyak 6 orang, penduduk lahir sebanyak 7 orang, dan penduduk miskin sebanyak 154 KK (BPS, 2022).

Kabupaten Bone, Tepatnya di kecamatan libureng desa tomppo bulu dusunmakkane, seperti banyak daerah lain di Indonesia, memiliki dinamika sosial ekonomi yang kompleks. Berdasarkan berbagai penelitian, tingkat kemiskinan di

Kabupaten Bone masih cukup tinggi. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kemiskinan antara lain pertumbuhan penduduk, sumber daya yang tidak merata, kemampuan penerimaan dan pengeluaran yang tidak seimbang, serta mentalitas kerja yang masih perlu ditingkatkan. Ketimpangan sosial juga menjadi masalah yang cukup serius di Kabupaten Bone. Hal ini terlihat dari perbedaan pendapatan yang signifikan antara kelompok masyarakat, serta akses yang tidak merata terhadap sumber daya dan peluang. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Bone masih bergantung pada sektor pertanian. Namun, kondisi ini juga rentan terhadap fluktuasi harga komoditas pertanian dan bencana alam. (Bahar et al., 2022)

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga, pemerintah meluncurkan program sosial. program sosial yang ada di Desa Tomppo bulu dusun makkanie khusus yang diberi nama Program Keluarga Harapan (PKH), yang dilaksanakan sejak tahun 2007. Menurut Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial PKH dirancang untuk membantu penduduk miskin terbawah berupa bantuan bersyarat. Program ini diharapkan mampu berkontribusi untuk mempercepat pencapaian tujuan Pembangunan millennium (*Millennium Development Goals* atau MDGs), yaitu pengurangan penduduk miskin ekstrim dan kelaparan, pencapaian pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi dan balita dan pengurangan kematian ibu melahirkan. (Jannah, 2019)

Namun keberadaan program ini menimbulkan banyak permasalahan. Seperti tidak tepat sasaran penerima bantuan, menimbulkan konflik sosial. Fenomena yang terjadi adalah PKH diberikan pada orang yang salah, misalnya yang menerima bantuan seharusnya adalah masyarakat kurang mampu, namun pada

kenyataannya yang menerima bantuan adalah orang-orang berkecukupan, sehingga masyarakat dan yang seharusnya menerima bantuan tetap hidup dalam kekurangan. Perilaku tidak adil dalam penyaluran PKH yang terjadi saat ini dapat menimbulkan konflik antar masyarakat dan menimbulkan rasa ketidakpercayaan terhadap pemimpinnya.

Keberhasilan program bantuan sosial dapat dilihat dari sejauh mana program ini mampu memenuhi kebutuhan dasar, memberikan akses ke layanan sosial, serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan. (Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2020)., n.d.)

Penelitian ini berfokus pada program bantuan sosial yang dijalankan oleh pemerintah di Kabupaten Bone, yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu. Efektivitas program ini menjadi fokus utama, dengan mempertimbangkan bagaimana program tersebut dapat disalurkan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi sejauh mana program bantuan sosial mampu menghasilkan perubahan nyata dalam mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan, serta bagaimana program ini memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup mereka. Dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai efektivitas program bantuan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu di Kabupaten Bone dengan judul Efektivitas Program Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kurang Mampu Di Kabupaten Bone.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman program bantuan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat kurang mampu Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone?
2. Bagaimana ketepatan sasaran bantuan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat kurang mampu Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone?
3. Bagaimana ketepatan waktu penyaluran bantuan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat kurang mampu Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone?
4. Bagaimana pencapaian tujuan program bantuan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat kurang mampu di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone?
5. Bagaimana perubahan nyata program bantuan sosial meningkatkan kesejahteraan Masyarakat kurang mampu Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemahaman program bantuan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat kurang mampu Di Kecamatan

Libureng Kabupaten Bone.

2. Untuk mengetahui ketepatan sasaran bantuan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat kurangmampu di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.
3. Untuk mengetahui ketepatan waktu program bantuan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat kurang mampu di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.
4. Untuk mengetahui pencapaian tujuan program bantuan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat kurang mampu di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.
5. Untuk mengetahui perubahan nyata program bantuan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat kurang mampu di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.

D. Manfaat Penelitian

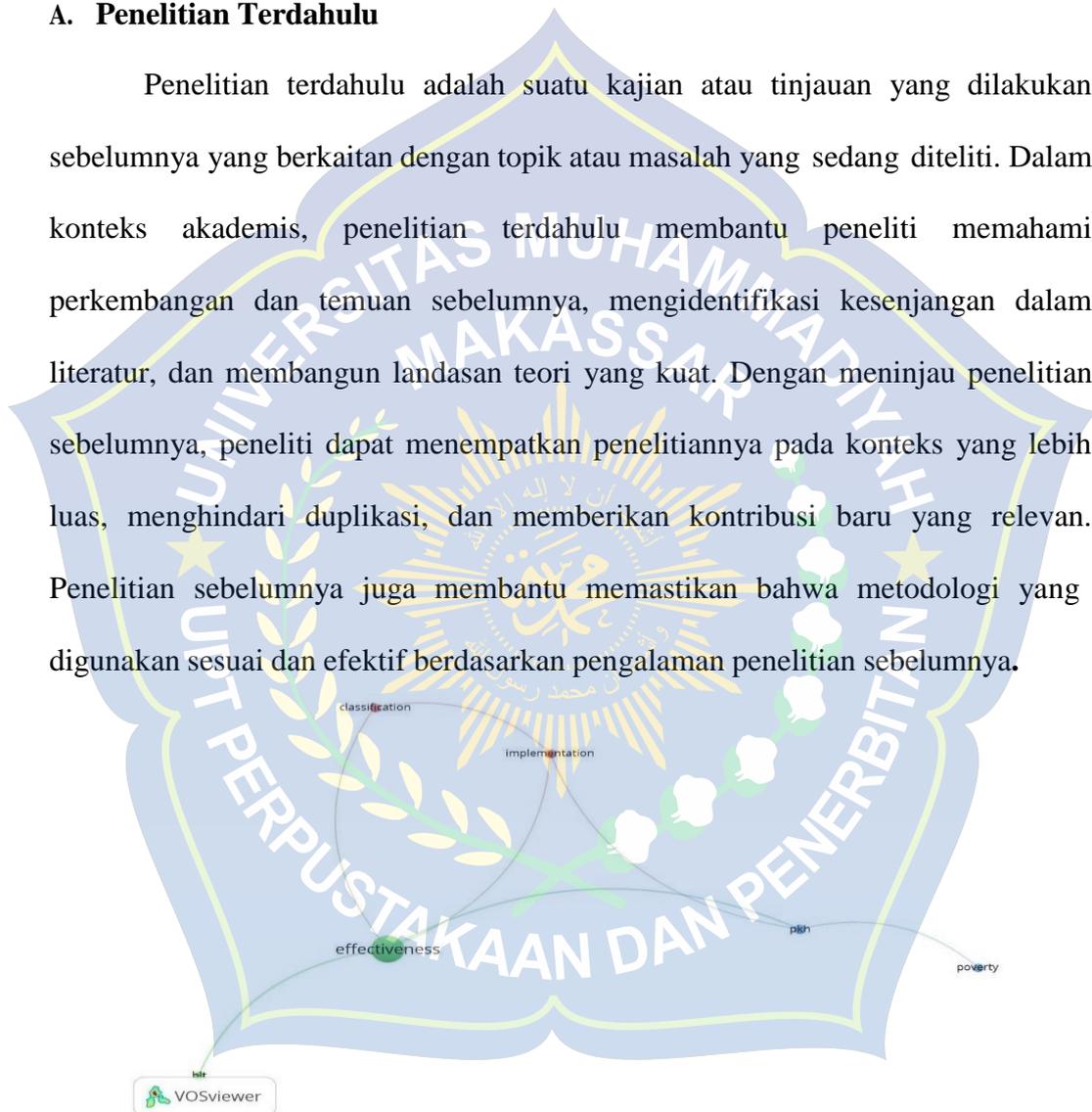
1. Secara teoritis, Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan menjadi rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya.
2. Secara praktis, Hasil penelitian ini juga di harapkan berguna sebagai sumbangan pemikiran dan bahan informasi bagi masyarakat kecamatan libureng kabupaten bone.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah suatu kajian atau tinjauan yang dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Dalam konteks akademis, penelitian terdahulu membantu peneliti memahami perkembangan dan temuan sebelumnya, mengidentifikasi kesenjangan dalam literatur, dan membangun landasan teori yang kuat. Dengan meninjau penelitian sebelumnya, peneliti dapat menempatkan penelitiannya pada konteks yang lebih luas, menghindari duplikasi, dan memberikan kontribusi baru yang relevan. Penelitian sebelumnya juga membantu memastikan bahwa metodologi yang digunakan sesuai dan efektif berdasarkan pengalaman penelitian sebelumnya.



Gambar 2.1 VosViewer

Gambar diatas menampilkan visualisasi penggunaan VosViewer dalam judul “Efektivitas Program Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Libureng

Kabupaten Bone” Berdasarkan Gambar di atas dapat dilihat dalam penelitian 3 tahun terakhir efektivitas program bantuan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan berada pada lingkaran hijau yang artinya masih belum banyak diteliti, oleh karena itu dapat di simpulkan bahwa topik efektivitas program bantuan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat masih memungkinkan dan memiliki peluang untuk dijadikan sebagai bahan penelitian selanjutnya.

1. Penelitian oleh Djabar, D. A., Olilingo, F. Z., dan Santoso, I. R. (2022) dengan judul "Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Desa Lonuo Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango" bertujuan untuk mengetahui efektivitas program PKH dalam mengurangi kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data primer melalui kuesioner yang diberikan kepada 50 penerima manfaat program. Efektivitas pelaksanaan program diukur dengan menghitung rasio efektivitas berdasarkan tiga pendekatan: sumber daya, proses, dan sasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga pendekatan tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa program PKH sangat efektif. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan agar pemerintah terus mengawasi pelaksanaan PKH untuk memastikan manfaatnya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Hasil penelitian dari Efektifitas bantuan sosial program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Muhammad luthfi (2019). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif “Metode penelitian kualitatif, merupakan Penelitian yang

dilakukan untuk mengetahui nilai variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Adapun hasil dari penelitian ini adalah, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Margajaya Kecamatan Ngamprah KBB ini sudah berjalan cukup baik. Ini dapat dilihat dari setiap tahapan proses pelaksanaannya yang berjalan lancar. Apabila dilihat dari keadaan penerima bantuan PKH tersebut mereka menggunakannya untuk membantu kondisi sosial dan pendidikan anak-anak keluarga miskin, membantu biaya kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak dibawah 6 tahun dari keluarga miskin, serta menyadarkan peserta PKH akan pentingnya layanan pendidikan dan Posyandu, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Luthfi, 2019)

3. Penelitian oleh Rahmah Indawati (2022) berjudul "Efektivitas Penyaluran Program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Masa Pandemi COVID-19 di Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar" menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sumber data dari wawancara dan telaah dokumen. Narasumber penelitian terdiri dari delapan orang, termasuk Pegawai Bidang Fakir Miskin, Lurah Kalabbirang, Pegawai Bagian Data Kelurahan Kalabbirang, serta lima penerima manfaat BST. Penelitian ini meneliti efektivitas penyaluran BST dengan sembilan indikator efektivitas dan lima pertanyaan tentang pemantauan program. Hasilnya menunjukkan bahwa penyaluran BST di Kelurahan Kalabbirang efektif dan sesuai rencana, didukung oleh ketepatan sasaran, pencapaian

tujuan program, serta pemantauan yang berjalan baik. Peran aktif dinas sosial dan kelurahan sangat mendukung keberhasilan program di masa pandemi ini.

4. Hasil penelitian dari Mayumi Getzemani Itshua Palili, Ratna Indriasari, Definitif Endrina Kartini Mendrofa. Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Cibeureum Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian ini menggunakan Menggunakan metode penelitian kualitatif penelitian yang yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana adalah Sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Kemudian, peneliti melaksanakan teknik pengumpulan data sebagai langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian sendiri adalah mendapatkan data. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Efektivitas pelaksanaan program bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Cibeureum Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, belum efektif, dan bahkan banyak yang belum tepat sasaran sehingga tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) belum tercapai secara optimal, namun walaupun begitu program ini sudah berjalan dengan baik oleh

pemerintah karena sudah banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH). (Palili et al., 2024)

Adapun perbedaan Berdasarkan keempat penelitian terdahulu di atas terdapat perbedaan dengan peneliti saat ini akan penelitian lakukan, keempat penelitian di atas menjelaskan, efektivitas pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) dalam Upaya penanggulangan kemiskinan, efektivitas bantuan sosial program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, efektivitas penyaluran program bantuan sosial tunai dimasa pandemi, efektivitas pelaksanaan program bantuan sosial program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. sedangkan penelitian ini akan berfokus pada efektivitas program bantuan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat kurang mampu di kabupaten bone.

B. Konsep Dan Teori

1. Konsep Efektivitas

a. Pengertian efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berjalan dengan baik. Efektivitas dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata efektif yang diartikan dengan ada efeknya (ada akibatnya, pengaruh, ada kesannya), manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, berhasil (KBBI 2005). Efektivitas merupakan unsur pokok dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi atau program yang akan dijalankan. Berarti juga dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan

suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah tercapai. Dimana apabila semakin besar persentase target yang dapat dicapai, maka akan semakin tinggi pula keefektivasannya, Dikatakan efektif apabila tercapainya tujuan ataupun sasaran –sasaran seperti yang telah ditentukan. (Rahmadi, 2022)

Efektivitas diartikan sebagai suatu ukuran yang dapat menggambarkan sejauh mana target dapat tercapai. Keefektifan suatu program dapat diamati dari indikator-indikator berupa ketepatan penentuan pilihan, waktu, tujuan dan sasaran. Oleh karena itu, pengukuran efektivitas perlu dilakukan karena nantinya akan terlihat seberapa efektif bansos tersebut dalam memberikan kontribusi terhadap kehidupan Masyarakat kurang mampu. Efektivitas berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuan yang sudah ditetapkan di dalam suatu instansi, aktivitas ataupun program. (Zakiah et al., 2020)

b. Teori efektivitas

Pengertian efektivitas menurut Abdurahmat (2003:92) Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektivitas Sondang P. Siagian (2001:4) Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankan. Berdasarkan pendapat para ahli dapat

diketahui bahwa efektifitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan Gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa efektifitas adalah merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktivasi-aktivasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. (Luthfi, 2019)

Kemudian Efektivitas menurut Bedjo Siswanto (1990:62) berarti menjalankan pekerjaan yang benar. Menurut Sutarto (1978:95) Efektivitas kerja adalah suatu keadaan dimana aktifitas jasmaniah dan rohaniah yang dilakukan oleh manusia dapat mencapai hasil akibat sesuai yang dikehendaki. Efektivitas kerja merupakan suatu ukuran tentang pencapaian suatu tugas atau tujuan (Schermerhorn, 1998:5). Menurut Handoko (1997:7),

Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan. Menurut Siagian (1986:152) efektivitas kerja berarti penyelesaian pekerjaan tepat pada waktunya seperti yang telah ditetapkan sebelumnya. (Kemuja et al., 2022)

Lebih lanjut Pengertian lain menurut Susanto, “Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi” (Susanto, 2005:156). Menurut pengertian Susanto di atas, efektivitas bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan

sebelumnya secara matang. Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat dicapai. Setiap organisasi atau lembaga di dalam kegiatannya menginginkan adanya pencapaian tujuan. Tujuan dari suatu lembaga akan tercapai segala kegiatannya dengan berjalan efektif akan dapat dilaksanakan apabila didukung oleh faktor-faktor pendukung efektivitas. (Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, 2014)

Di samping itu Menurut Richard M Steers dalam (Saputro, 2020) efektivitas digolongkan dalam 3 (tiga) model, yaitu:

1. Model optimasi tujuan, penggunaan model optimasi bertujuan terhadap efektivitas organisasi memungkinkan diakuinyabakwa organisasi yang berbeda mengejar tujuan yang berbeda pula. Dengan demikian nilai keberhasilan atau kegagalan relatif dari organisasi tertentu harus ditentukan dengan membandingkan hasilhasil dengan tujuan organisasi.
2. Prespektif sistem, memusatkan perhatiannya pada hubungan antara komponen-komponen baik yang berbeda didalam maupun yang berada diluar organisasi. Sementara komponen ini secara bersamasama mempengaruhi keberhasilan atau keberhasilan organisasi. Jadi model ini memusatkan perhatiannya pada hubungan sosial organisasi lingkungan.
3. Tekanan pada perilaku, dalam model ini, efektivitas organisasi dilihat

dari hubungan antara apa yang diinginkan organisasi. Jika keduanya relatif homogen, kemungkinan untuk meningkatkan prestasi keseluruhan organisasi sangat besar.

c. Faktor yang mempengaruhi efektivitas

Empat faktor yang mempengaruhi efektivitas, yang dikemukakan oleh Richard M Steers dalam (Engka & Natsir, 2024)

1. Karakteristik Organisasi (struktur dan organisasi).

Penekanan ciri organisasi oleh Steers adalah terhadap struktur dan teknologi karena kedua variabel tersebut sangat mempengaruhi efektivitas organisasi. Perubahan yang bersifat inovatif dalam hubungan interaktif antar anggota-anggota organisasi atau penyusunan hubungan SDM akan meningkatkan efektivitas organisasi. Dengan tercapainya berbagai kemajuan di dalam struktur organisasi, misalnya dengan meningkatkan spesialisasi fungsi, ukuran organisasi, sentralisasi pengambilan keputusan dan formalisasi akan meningkatkan produktivitas organisasi. Tercapainya kemajuan di dalam teknologi dapat memperkenalkan cara-cara yang lebih produktif dengan menggunakan sarana-sarana baru akan mempengaruhi efektivitas organisasi. Pemanfaatan kedua hal tersebut secara baik, yakni struktur dan teknologi akan mempermudah organisasi untuk mencapai tujuannya.

2. Karakteristik Lingkungan (ketepatan atas keadaan lingkungan).

Karakteristik lingkungan ini mencapai dua aspek yang saling berhubungan yaitu lingkungan ekstern dan lingkungan intern. Lingkungan ekstern yaitu semua lingkungan kekuatan yang timbul diluar batasan-batasan organisasi. Lingkungan intern pada umumnya dikenal sebagai iklim organisasi yang meliputi bermacam-macam atribut lingkungan kerja.

3. Karakteristik Pekerjaan (perbedaan sifat pekerja).

Lingkungan dalam bekerja memiliki pandangan tujuan kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda, individu ini memiliki pengaruh langsung terhadap rasa ketertarikan pada organisasi dan potensi kerja. Tanpa rasa keterkaitan dan prestasi, efektivitas mustahil akan tercapai.

4. Karakteristik Kebijakan dan Praktek Manajemen.

Faktor ini merupakan mekanisme yang meliputi penetapan tujuan strategi, pencarian dan pemanfaatan sumber daya secara efisien, menciptakan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan serta adaptasi dan inovasi organisasi. Dalam hal ini, manajer sangat penting untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan secara profesional untuk mencapai tujuan.

Untuk melihat sejauh mana efektivitas dari pelaksanaaaprogram bantuan sosial dapat diukur dengan menggunakan 5 indikator menurut (Sutrisno, 2007) yakni sebagai berikut:

a. Pemahaman program

Pemahaman program adalah indikator yang digunakan untuk menganalisis seberapa baik pengetahuan dari pihak yang terlibat mengenai program yang dilaksanakan, selain itu indikator ini juga bertujuan untuk mengetahui proses sosialisasi yang dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat penerima bantuan mengenai program bantuan sosial tunai (BST) dengan pemahaman program yang baik maka segala bentuk rencana akan lebih mudah untuk dioperasionalkan.

Selain itu juga dapat kita pahami bahwa Pemahaman program merujuk pada pengetahuan dan kesadaran tentang tujuan, mekanisme, dan manfaat suatu program. Dalam konteks program bantuan sosial, ini berarti memahami apa yang ingin dicapai, bagaimana program dilaksanakan, dan manfaat yang diharapkan, serta peran dan tanggung jawab semua pihak terkait. Pemahaman yang baik tentang program penting untuk memastikan pelaksanaan yang efektif, tepat sasaran, dan pencapaian tujuan program yang optimal. Tanpa pemahaman yang memadai, pelaksanaan program dapat terganggu dan dampak positifnya mungkin tidak maksimal.

b. Tepat sasaran

Tepat sasaran atau ketepatan sasaran adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu program atau kegiatan mencapai sasaran atau target yang ingin dicapai, ketepatan sasaran sangat

mendukung efektivitas dari pelaksanaan sebuah program. Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis indikator ini digunakan untuk melihat target atau sasaran yang dicapai dari pelaksanaan penyaluran program bantuan sosial tunai bagi Masyarakat.

Tepat sasaran merujuk pada sejauh mana suatu program, kebijakan, atau intervensi mencapai kelompok atau individu yang memang menjadi target utama atau penerimamanfaat yang dimaksud. Dalam konteks program bantuan sosial, "tepat sasaran" berarti bahwa bantuan atau dukungan yang diberikan ditujukan kepada masyarakat atau kelompok yang benar-benar membutuhkan dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, program tersebut efektif dalam menyalurkan manfaat kepada penerima yang benar-benar memenuhi syarat dan berpotensi mendapatkan keuntungan dari bantuan tersebut, sehingga mencegah adanya penyaluran yang tidak relevan atau penyalahgunaan.

c. Tepat waktu

Merujuk pada pelaksanaan kegiatan atau program sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sehingga bantuan atau dukungan disalurkan kepada penerima manfaat pada waktu yang diperlukan. Dalam konteks program bantuan sosial, ini berarti bantuan diberikan tanpa penundaan yang signifikan, memastikan bahwa penerima dapat memanfaatkan dukungan tersebut secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan yang mendesak.

Hal ini berkaitan dengan penggunaan waktu dalam sebuah pelaksanaan kegiatan. Penggunaan waktu tersebut haruslah sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati dan ditentukan sebelumnya. Penggunaan waktu yang tepat akan sangat mendukung terciptanya efektivitas dari pelaksanaan suatu program.

d. Tercapainya tujuan

Tercapainya tujuan berarti berhasilnya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan melalui upaya yang terencana dan terukur. Ini menunjukkan bahwa semua langkah, strategi, dan sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai target tersebut telah dikelola dengan baik, dan hasil yang diinginkan telah terwujud. Pencapaian ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan dalam implementasi, tetapi juga efektivitas perencanaan dan adaptasi terhadap tantangan yang muncul. Dalam konteks individu, organisasi, atau kebijakan publik, tercapainya tujuan menunjukkan bahwa proses yang dilakukan telah efektif dalam mengatasi berbagai hambatan dan memanfaatkan peluang untuk mencapai hasil yang ditetapkan.

e. Perubahan nyata

Perubahan nyata merujuk pada perubahan yang memberikan dampak signifikan dan terlihat jelas pada kondisi atau situasi yang ada, bukan hanya bersifat sementara atau simbolis. Ini mencakup perubahan yang dapat diukur dengan indikator konkret, mempengaruhi langsung kehidupan atau sistem yang relevan, dan diakui oleh pihak-pihak yang

terlibat. Perubahan nyata mencerminkan hasil yang substansial dari usaha yang dilakukan, menghasilkan efek yang signifikan dan berdampak pada kondisi yang ada.

Perubahan nyata adalah transformasi yang menciptakan dampak substansial dan jelas pada suatu situasi atau kondisi, yang dapat dilihat, diukur, dan dirasakan secara langsung. Perubahan ini melibatkan perubahan mendasar yang mengubah cara kerja, perilaku, atau hasil, dan biasanya disertai dengan hasil yang signifikan yang menggantikan keadaan sebelumnya. Berbeda dengan perubahan kosmetik atau superfisial, perubahan nyata mencerminkan kemajuan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi individu atau kelompok yang terkena dampak.

Dengan demikian adapuan efektifitas dalam konteks bantuan sosial, Dalam hal program bantuan sosial, efektifitas dapat diukur dari sejauh mana program tersebut berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi sasaran. Peningkatan pendapatan, peningkatan akses ke layanan dasar, atau penurunan tingkat kemiskinan adalah indikatornya. Efektivitas program bantuan sosial sangat dipengaruhi oleh hal-hal seperti distribusi yang tepat sasaran, pengelolaan anggaran yang efektif, dan kepuasan penerima manfaat.

2. Konsep Efektivitas Program

a. Pengertian efektifitas program

Efektivitas program merujuk pada sejauh mana suatu program berhasil

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, efektivitas program diukur bukan hanya oleh pencapaian tujuan akhir, tetapi juga oleh cara program dijalankan, penggunaan sumber daya, dan dampak pada penerima manfaat.

Efektivitas program adalah ukuran Keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan disebut efektifitas program. Program efektif jika mampu memberikan hasil yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal. Efektivitas juga mencakup kemampuan program untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan penerima manfaat.

Efektivitas program mengacu pada sejauh mana suatu program mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan cara yang optimal. Ini menunjukkan seberapa baik program tersebut mampu memberikan hasil yang diharapkan atau mengatasi masalah yang menjadi alasan program tersebut dibentuk. Efektivitas program diukur dari kemampuan program untuk menghasilkan dampak positif sesuai dengan indikator yang telah dirancang sebelumnya (Sary, 2024)

b. Teori efektivitas program

Menurut Richard M. Steers (1977), efektivitas program adalah "kemampuan program untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, serta memenuhi kebutuhan stakeholder secara efisien." Steers menekankan bahwa efektivitas program bukan hanya tentang pencapaian hasil, tetapi juga tentang bagaimana hasil tersebut dicapai dan dampaknya

terhadap penerima manfaat. (Steers, R. M. (1977). *Organizational Effectiveness: A Behavioral View*. Santa Monica, CA: Goodyear Publishing Company., n.d.)

Teori efektivitas program mengacu pada berbagai pendekatan dan model yang digunakan untuk memahami bagaimana sebuah program dapat dinilai efektif atau tidak. Teori ini menggabungkan konsep-konsep dari manajemen, kebijakan publik, serta evaluasi program. Beberapa teori dan model yang sering digunakan dalam mengevaluasi efektivitas program meliputi (Advebty, 2023):

a. Teori Logika Program (Program Logic Model)

Teori logika program menyatakan bahwa efektivitas program bergantung pada hubungan yang jelas antara sumber daya yang digunakan (input), kegiatan yang dilakukan (proses), hasil yang diharapkan (output), dan dampak yang dihasilkan (outcome). Dalam teori ini, efektivitas diukur berdasarkan apakah input dan proses program menghasilkan output dan outcome yang diharapkan.

- 1) Input: Sumber daya yang digunakan dalam program (misalnya dana, tenaga kerja).
- 2) Proses: Aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan program.
- 3) Output: Hasil langsung dari aktivitas tersebut (misalnya jumlah orang yang terlibat, produk yang dihasilkan).
- 4) Outcome: Dampak jangka pendek dan jangka panjang dari output program.

b. Teori Sistem (Systems Theory)

Teori sistem memandang efektivitas program sebagai hasil interaksi yang harmonis antara berbagai elemen program. Program dilihat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari beberapa komponen yang saling terkait (input, proses, output, dan lingkungan eksternal). Efektivitas program dipengaruhi oleh sejauh mana semua komponen ini berfungsi secara sinergis. Teori ini juga menekankan pentingnya umpan balik (feedback) dalam meningkatkan efektivitas. Melalui evaluasi dan umpan balik, program dapat terus diperbaiki agar lebih efektif dalam mencapai tujuannya.

c. Teori Kontingensi (Contingency Theory)

Teori kontingensi menyatakan bahwa tidak ada satu pendekatan atau metode yang dapat diterapkan secara universal untuk mencapai efektivitas program. Sebaliknya, efektivitas program bergantung pada faktor-faktor kontekstual seperti lingkungan, sumber daya yang tersedia, dan karakteristik organisasi atau kelompok sasaran. Menurut teori ini, program harus disesuaikan dengan kondisi spesifik agar bisa efektif.

d. Teori Implementasi Kebijakan

(Policy Implementation Theory) Teori ini mengkaji efektivitas program dari sudut pandang implementasi kebijakan. Efektivitas tergantung pada sejauh mana kebijakan yang dirumuskan diterapkan dengan benar dan sesuai dengan rancangan awal. Hal ini meliputi

komitmen dan kapasitas organisasi yang melaksanakan program, serta penerimaan dari kelompok sasaran. Faktor-faktor seperti koordinasi antar lembaga, kesesuaian regulasi, serta kualitas sumber daya manusia sangat mempengaruhi efektivitas implementasi program.

e. Model Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product)

Model CIPP digunakan dalam evaluasi program untuk menilai efektivitasnya melalui empat komponen utama:

- 1) Context: Menilai relevansi program berdasarkan analisis situasional masalah yang ingin diselesaikan.
- 2) Input: Mengevaluasi sumber daya, strategi, dan rencana yang digunakan untuk mendukung program.
- 3) Process: Menganalisis pelaksanaan program, termasuk hambatan dan kesesuaian dengan rencana.
- 4) Product: Menilai hasil akhir program, baik dalam hal output maupun outcome. Model CIPP menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan pada setiap tahap program untuk meningkatkan efektivitas secara keseluruhan.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Program.

Menurut (Weiss, C.H. (1998) *Evaluation: Methods for Studying Programs and Policies*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall., n.d.)

Beberapa faktor yang mempengaruhi Efektivitas program, antara lain:

- 1) Desain Program, Desain program yang baik, dengan tujuan yang jelas dan strategi yang tepat, merupakan kunci utama efektivitas. Program

yang dirancang dengan baik memiliki peluang lebih besar untuk mencapai hasil yang diinginkan.

- 2) Pelaksanaan Program, Kualitas pelaksanaan program, termasuk manajemen, koordinasi, dan pengawasan, sangat menentukan efektivitas. Program yang diimplementasikan dengan baik cenderung lebih efektif.
- 3) Keterlibatan Stakeholder, Partisipasi aktif dari stakeholder, termasuk penerima manfaat, sangat penting dalam meningkatkan efektivitas program. Keterlibatan mereka memastikan bahwa program benar-benar memenuhi kebutuhan dan harapan mereka.
- 4) Evaluasi dan Monitoring, Evaluasi yang rutin dan sistematis memungkinkan program untuk diukur efektivitasnya dan diidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Monitoring berkelanjutan juga membantu dalam menjaga kualitas pelaksanaan program. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antararencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Penilaian terhadap tingkat kesesuaian program merupakan salah satu cara untuk mengukur efektivitas program.

Efektivitas program dapat diketahui dengan membandingkan tujuan program dengan output program. Sementara itu pendapat pelanggan dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan efektivitas program. Hal tersebut dinyatakan oleh Kerckpatrick bahwa evaluasi terhadap

efektivitas program dapat dilakukan, diantaranya melalui reaksi pelanggan terhadap program yang diikuti. Bermanfaatkah dan puaskah pelanggan terhadap program merupakan pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mengukur reaksi pelanggan terhadap program. (Ii, n.d.) Maka dari itu, Suatu program yang dijalankan dapat dikatakan efektif apabila mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Untuk menilai efektivitas suatu program perlu dilakukan agar dapat mengetahui sejauhmana dampak dan manfaat yang dihasilkan oleh program tersebut. karena efektifnya suatu program merupakan gambaran keberhasilan organisasi dalam tercapainya sasaran yang telah ditetapkan. (Anis et al., 2021)

3. **Pengertian bantuan sosial**

Bantuan sosial merupakan upaya sistematis yang bertujuan untuk memberikan dukungan kepada individu atau kelompok masyarakat yang menghadapi tantangan ekonomi atau kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya. Konsep bantuan sosial mencakup berbagai bentuk intervensi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Program bantuan sosial seringkali melibatkan penyediaan sumber daya, baik finansial maupun non- finansial, kepada mereka yang membutuhkan, dengan harapan dapat meringankan beban hidup dan menciptakan peluang untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.

Menurut Retnaningsih (2020:219) Bantuan sosial merupakan bentuk bantuan yang merupakan sebuah usaha dari pemerintah guna memberikan

perlindungan sosial kepada masyarakat miskin atau masyarakat yang berada di kelompok rentan akan terhadap resiko- resiko sosial. “Secara konseptual bantuan sosial tunai dimaksudkan untuk meringan anggota masyarakat yang tidak mampu dan terlantar agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehingga dapat mempertahankan bahkan mengembangkan dirinya sebagai manusia. (Rahman & Malawat, 2021)

Bantuan sosial merupakan program pemerintah yang ditujukan Memberikan bantuan kepada masyarakat yang menderita risiko sosial. Bantuan dengan itu Pemerintah memberikan berbagai jenis, seperti barangan dan moneter. Program bantuan sosial ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang pekerja sosial. Pengertian bansos berdasarkan UU No 14 Tahun 2019, Merupakan bantuan berupa barang, uang, atau jasa yang diberikan kepada individu, keluarga, Kelompok dan masyarakat dalam kelompok kurang mampu secara finansial. Program ini Hal ini bertujuan untuk mengatasi kemiskinan yang dirasakan Masyarakat Indonesia. (Fuaddah & Fridayne, 2023)

Bantuan sosial biasanya diberikan melalui program-pemerintah atau organisasi non pemerintah (NGO) dan dapat mencakup berbagai bentuk, seperti bantuan tunai langsung, penyediaan kebutuhan sehari- hari, atau akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan. Program ini dirancang untuk membantu kelompok rentan di masyarakat, termasuk mereka yang hidup dalam kemiskinan, penyandang disabilitas, lansia, dan anak-anak dari keluarga kurang mampu. Bantuan

sosial adalah upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu melalui distribusi sumber daya. Bantuan sosial ini sering kali berupa bantuan uang tunai, paketsembako, atau program-program khusus lainnya yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Dalam konteks akademis dan praktis, bantuan sosial merupakan bagian penting dari kebijakan publik yang digunakan untuk memperkuat jaringan pengaman sosial dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. (Khoerunisa et al., 2023).

4. Tujuan Pemberian Bantuan Sosial

Ketentuan mengenai bansos diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial. Peraturan ini mengubah UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Menurut (Revandi, 2021) Tujuan pemberian bantuan sosial adalah sebagai berikut:

- a) Rehabilitasi Sosial, Bansos bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik.
- b) Perlindungan Sosial, Tujuan selanjutnya adalah untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- c) Pemberdayaan Sosial, Bansos juga bertujuan sebagai pemberdayaan sosial, yakni untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi

kebutuhan dasarnya.

- d) Jaminan Sosial, Bansos sebagai jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- e) Penanggulangan Kemiskinan, Tujuan bansos sebagai penanggulangan kemiskinan memiliki arti bahwa bansos merupakan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- f) Penanggulangan Bencana, Pemberian bansos bertujuan untuk penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

5. Syarat Penerima Bantuan PKH

Menurut Pedoman Umum PKH (2019:19) untuk mendapatkan bantuan tunai, peserta PKH harus memenuhi persyaratan dan berkomitmen untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan anak dan kesehatan keluarga, terutama ibu dan anak. Salah satu persyaratanyang harus dipenuhi oleh penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) adalah sebagai berikut:

- a) Kesehatan

Kesehatan adalah modal yang tidak ternilai bagi individu dan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan. Kurang perhatian terhadap masalah kesehatan memiliki dampak negative pada kehidupan masyarakat dan individu.

Memenuhi persyaratan kesehatan yang ditetapkan dalam protocol pelayanan kesehatan adalah penting bagi penerima PKH sebagai berikut: Memberikan vitamin A kepada anak-anak usia 0-6 tahun.

1. Menerima vaksinasi lengkap dan melakukan timbangan berat badan secara teratur setiap bulan.
2. Melakukan pemeriksaan berat badan secara teratur dan terima vitamin A dua kali setahun, pada bulan februari dan agustus.
3. Jika ada fasilitas pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diposyandu terdekat, ikuti program PAUD.

b) Pendidikan

Pendidikan adalah upaya sadar yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu melalui kegiatan pengajaran dan pelatihan yang berlangsung sepanjang hidup di berbagai lingkungan belajar untuk mempersiapkan manusia untuk memainkan peran yang sesuai.

Semua ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan karena pendidikan memberikan pengalaman perspektif hidup kepada generasi berikutnya. Pendidikan juga merupakan proses timbal balik antara manusia dengan satu sama lain dan lingkungan sekitarnya, yang ditandai dengan pertumbuhan potensi setiap orang untuk tujuan hidupnya dalam masyarakat.

Pendidikan menurut Undang Undang SISDIKNAS no. 20 tahun 2003, adalah upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sedemikian rupa sehingga peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekokohan spiritual keagamaan,

kepribadian, pengendalian diri, kecerdasan, keterampilan bermasyarakat, dan akhlak mulia. Pelayanan harus didukung untuk dapat mencapai tujuan pendidikan.

Anak-anak yang menerima bantuan PKH harus pergi ke sekolah baik formal maupun non formal, karena mereka dibantu oleh pemerintah dengan bantuan PKH. Sekolah berfungsi sebagai tempat pendidikan. Untuk mempersiapkan individu berkembang menjadi bagian dari masyarakat, bangsa, dan dunia di masa yang akan datang. Sekolah diharapkan dapat berperan dalam mengembangkan potensi anak-anak, meningkatkan kualitas hidup, serta menghargai martabat manusia untuk mencapai tujuan nasional. Sekolah memiliki peran dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu sebagai lembaga mempersiapkan anak untuk hidup, mencerminkan keadaan dimasyarakat, memberikan pembinaan, dan menyediakan lingkungan yang berfungsi sebagai pengganti keluarga dan pendidik sebagai orang tua.

Menurut Pedoman Umum PKH anak-anak yang menerima PKH harus memenuhi persyaratan akademik dan hadir di sekolah atau satuan pendidikan selama minimal 85% dari hasil sekolah sebulan selama tahun akademik sebagai berikut:

1. Peserta PKH berusia 7-15 tahun harus terdaftar di lembaga Pendidikan dasar (SD/MI/SDLB/Paket A atau SMP/MT/SMLB/Paket B termasuk SMP/MT terbuka) mereka juga harus hadir dikelas setidaknya 85% dari hari belajar efektif setiap bulan selama tahun akademik. Anak - anak yang berusia 5 dan 6 tahun yang telah masuk sekolah dasar harus

memenuhi persyaratan pendidikan.

2. Anak-anak penyandang disabilitas yang masih mampu mengikuti pendidikan reguler dapat mengikuti program SD/MI atau MT, anak-anak yang tidak mampu mengikuti pendidikan reguler dapat mengikuti SDLB atau SMPLB.
3. Peserta PKH yang berusia antara 15 hingga 18 tahun dan belum menyelesaikan pendidikan dasar harus didaftarkan ke satuan pendidikan reguler atau non reguler (SD/MI atau SMP/MTs, atau Paket A, atau Paket B).
4. Anak-anak peserta PKH yang bekerja, menjadi pekerja anak atau meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama harus mengikuti program pemulihan untuk mempersiapkan diri untuk kembali ke sekolah. Layanan rumah singgah atau shalter yang diberikan kepada anak jalanan oleh Kementerian Sosial dan Kemenakertrans untuk pekerja anak merupakan Program Remedial.

Maka keluarga miskin berhak mendapatkan bantuan PKH secara teratur dan konsisten jika peserta PKH dapat memenuhi kedua persyaratan pendidikan dan kesehatan secara konsisten. dalam memanfaatkan bantuan tersebut.

C. Kerangka Pikir

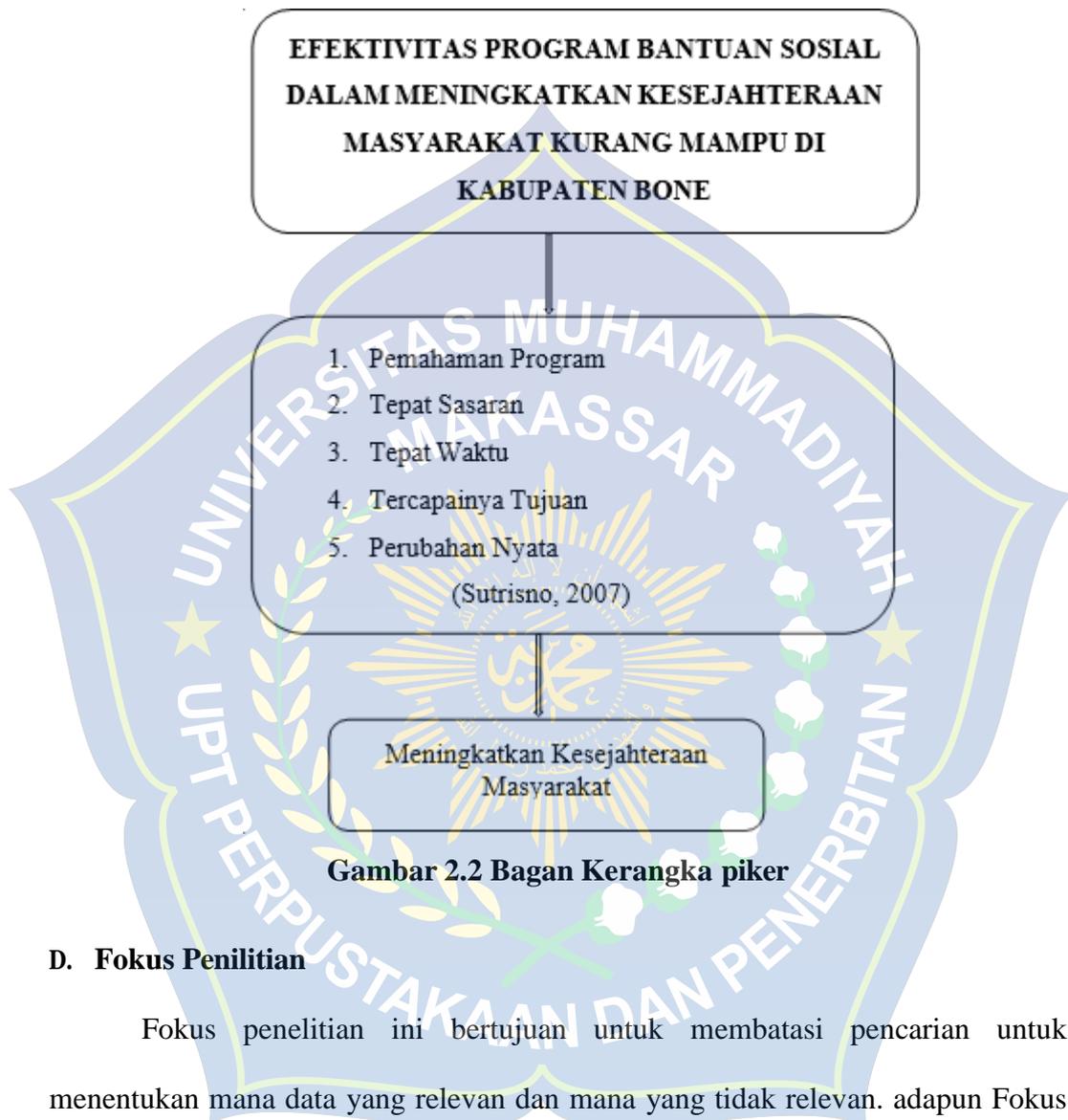
Efektivitas adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen yang mana target tersebut sudah ditentukan sebelumnya. Kerangka pikiran dimaksud untuk memberikan gambaran lebih rinci mengenai variabel penelitian ini. Adapun indikator pengukur

efektivitas dari pelaksanaan program bantuan sosial menurut Sutrisno (2016 : 125-126) dalam (Rahman & Malawat, 2021) terdapat 5 indikator yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata. Yang akan diambil peneliti sebagai ukuran efektivitas program bantuan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat kurang mampu di kabupaten bone.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, penulis menjelaskan lima indikator utama yang menjadi dasar dalam pembahasan melalui sebuah bagan kerangka pikir. Bagan ini dirancang untuk memperlihatkan keterkaitan antara setiap indikator, sehingga pembaca dapat memahami alur pemikiran secara terstruktur dan sistematis. Kelima indikator tersebut disusun berdasarkan relevansinya terhadap topik pembahasan, sehingga mampu memberikan panduan yang menyeluruh dalam memahami konteks penelitian atau kajian yang dilakukan.

Bagan kerangka pikir ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu visual, tetapi juga menjadi representasi logika konseptual yang mendasari analisis penulis. Setiap komponen dalam bagan dijelaskan secara rinci, menunjukkan bagaimana masing-masing indikator saling berinteraksi dan berkontribusi terhadap pembahasan utama. Dengan pendekatan ini, diharapkan pembaca dapat memperoleh pemahaman yang mendalam serta melihat keterpaduan antara teori dan praktik yang diuraikan dalam kajian.:

Bagan Kerangka Pikir



Gambar 2.2 Bagan Kerangka piker

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini bertujuan untuk membatasi pencarian untuk menentukan mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. adapun Fokus penelitian ini berfokus pada dampak program bantuan sosial terhadap Masyarakat kurang mampu di kabupaten bone,kecamatan libureng desa tomppobulu, dusun makkanie. Dengan mengacu pada 5 indikator utama:

1. Pemahaman program
2. Tepat sasaran
3. Tepat waktu

4. Tercapainya tujuan
5. Perubahan nyata

Berdasarkan uraian kerangka fikir diatas maka, fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas program bantuan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat bone. Khususnya di kecamatan libureng desa tompo bulu dusun makkanie.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Pemahaman program

Program bantuan sosial merupakan salah satu instrumen penting Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu di Kabupaten Bone, program bantuan sosial merupakan salah satu alat penting. Untuk mengetahui bagaimana program ini berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi orang-orang yang menerima manfaatnya, sangat penting untuk memahami seberapa efektif program tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi seberapa efektif program bantuan sosial di Kabupaten Bone dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sasaran seperti makanan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya.

Deskripsi fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis pemahaman mengenai efektivitas program bantuan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu di Kabupaten Bone. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana program-program bantuan sosial yang telah diimplementasikan berhasil memenuhi kebutuhan dasar masyarakat penerima manfaat, seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok

lainnya. Selain itu, penelitian ini akan mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut, termasuk keterbatasan sumber daya, mekanisme distribusi yang tidak merata, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan program

2. Tepat sasaran

Deskripsi fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas program bantuan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu di Kabupaten Bone, dengan penekanan pada ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana program-program bantuan sosial diimplementasikan secara tepat sasaran, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Penelitian ini akan mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam memastikan bantuan sosial disalurkan kepada penerima yang tepat, termasuk masalah dalam proses pendataan, validasi penerima, dan mekanisme distribusi yang efektif. Fokus penelitian juga mencakup analisis terhadap dampak ketepatan sasaran terhadap pencapaian tujuan program, serta bagaimana hal ini berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu.

3. Tepat waktu

Deskripsi fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas program bantuan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu di Kabupaten Bone, dengan perhatian khusus pada ketepatan waktu

dalam penyaluran bantuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana program-program bantuan sosial diimplementasikan secara tepat waktu, sehingga dapat memberikandampak positif yang maksimal bagi penerima manfaat.

Selain itu, penelitian ini akan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam memastikan penyaluran bantuan sosial berlangsung sesuai jadwal, termasuk faktor-faktor seperti keterlambatan administratif, kendala logistik, dan koordinasi antar instansi yang kurang optimal. Fokus penelitian juga mencakup analisis terhadap bagaimana ketepatan waktu dalam penyaluran bantuan mempengaruhi keberhasilan program dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Tercapainya tujuan

Deskripsi fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas program bantuan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu di Kabupaten Bone, dengan fokus pada tercapainya tujuan program tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana program-program bantuan sosial berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu memberikan dukungan yang signifikan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat penerima manfaat.

Penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi tercapainya tujuan program, termasuk efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga

terkait, dan masyarakat dapat berkontribusi pada kesuksesan program dalam mencapai hasil yang diinginkan.

Fokus penelitian mencakup analisis terhadap indikator keberhasilan program, seperti peningkatan akses terhadap layanan dasar, pengurangan tingkat kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan secara umum. Dengan mengkaji pencapaian tujuan program, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai efektivitas program bantuan sosial dan menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan keberhasilan program di masa mendatang.

Penelitian ini tidak hanya akan mengevaluasi hasil yang telah dicapai, tetapi juga memberikan pandangan tentang strategi yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa tujuan program bantuan sosial tercapai dengan lebih efektif di Kabupaten Bone

5. Perubahan nyata

Deskripsi fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas program bantuan sosial dalam menciptakan perubahan nyata dalam kesejahteraan masyarakat kurang mampu di Kabupaten Bone. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana program- program bantuan sosial berhasil menghasilkan dampak yang signifikan nyata dalam kehidupan penerima manfaat, baik dari segi peningkatan kualitas hidup, akses terhadap layanan dasar, maupun pengurangan kemiskinan.

Penelitian ini akan mengidentifikasi indikator-indikator perubahan yang dapat diukur, seperti peningkatan pendapatan, akses pendidikan dan kesehatan

yang lebih baik, serta peningkatan partisipasi sosial-ekonomi di tingkat komunitas. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat terciptanya perubahan nyata, termasuk peran pemerintah daerah, efektivitas pelaksanaan program, serta partisipasi aktif masyarakat.

Fokus penelitian mencakup analisis terhadap dampak jangka pendek dan jangka panjang dari program bantuan sosial, serta bagaimana program tersebut berhasil mengubah kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang berada di garis kemiskinan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai sejauh mana program bantuan sosial di Kabupaten Bone mampu menciptakan perubahan nyata dan berkelanjutan, serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan program yang lebih efektif di masa depan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengevaluasi hasil yang diharapkan, tetapi juga menilai dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat penerima manfaat, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang keberhasilan program dalam menciptakan perubahan nyata."

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal 14 oktober 2024–1 desember 2024, yang dilaksanakan di Kabupaten Bone, khususnya di Kecamatan Libureng, Desa Tompobulu, Dusun Makkanie, serta di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bone yang terletak di Jl. Andalus No.49, Watampone. Lokasi ini dipilih karena merupakan area fokus dari pelaksanaan program bantuan sosial.

Penelitian ini secara khusus akan difokuskan pada pelaksanaan program bantuan sosial di Tingkat desa, dengan tujuan menilai sejauh mana program ini disalurkan secara tepat waktu dan tepat sasaran, serta bagaimana program ini dapat menghasilkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat penerima bantuan. Selain itu, penelitian ini juga akan menggali bagaimana program bantuan sosial memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka

Area ini dipilih untuk mendapatkan informasi yang mendetail dan relevan mengenai efektivitas program bantuan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu di Kecamatan Libureng, Desa Tompobulu, Dusun Makkanie, dan di Kabupaten Bone secara umum.

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial atau perilaku dari perspektif subjektif. Ini

fokus pada pengalaman, pandangan, dan makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu fenomena. Penelitian ini tidak mengandalkan data numerik tetapi data deskriptif seperti wawancara, observasi, dan dokumen.

Dengan penggunaan jenis penelitian ini kita dapat memahami bagaimana efektivitas program bantuan sosial di kabupaten bone. Ini melibatkan pengumpulan data mendalam mengenai bagaimana efektivitas program bantuan sosial di kabupaten Bone dan berinteraksi dengan masyarakat.

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskripsi kualitatif yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum berbagai macam data yang dikumpulkan dari lapangan secara objektif, sedangkan dasar penelitiannya adalah survey, tujuan dari penelitian deskripsi ini adalah menggambarkan mengenai situasi-situasi atau kejadian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta efektivitas program bantuan sosial.

C. Sumber Data

Menurut (Harahap, 2020) sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data dari penelitian

1. Data Primer

Data primer ini di peroleh dari lapangan atau lokasi penelitian berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan dan observasi secara langsung sesuai objek penelitian tentang efektivitas program bantuan sosial.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui tulisan berupa

laporan, peraturan dan dokumen yang berkaitan dengan efektivitas program bantuan sosial.

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang memberikan informasi kepada peneliti atau yang menjadi informan yaitu orang-orang yang dapat melengkapi informasi tentang bagaimana efektivitas program bantuan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat kurang mapu di kabupaten bone. Berikut adalah tabel informan yang digunakan di dalam penelitian:

Tabel 3 1. Daftar Informan

Nama	Inisial	Peran
Drs. Muhammad Idhan, M.Si	MI	Kepala bidang perlindungan dan jaminan social
Ayu Puspita Sari S.Sos	APS	Bidang distribusi dan pemantauan program sosial Dinas Sosial
Muh. Rakib, S.Pd	MR	Pendamping penerima bantuan social
Tanti	TI	Penerima bantuan sosial
Bapak Anwar	AR	Penerima bantuan sosial
Ciang	CG	Penerima bantuan sosial
Unni	UI	Penerima bantuan sosial
Suhe	SH	Penerima bantuan sosial

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugyono, 2015) adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara

sistematik terhadap masalah yang tampak pada objek penelitian, teknik ini juga digunakan untuk mengetahui relevansi antara keterangan informan dan data yang ada dengan melakukan penelitian langsung terhadap objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu untuk mendapatkan gambaran mengenai objek peneliti dengan cara tanya-jawab secara lebih mendalam dan bertatap muka langsung dengan informan, percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang ditanyakan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud berupa foto-foto yang ada dalam objek penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Menurut (Sugyono,2015) teknik analisis data adalah langkah yang dilakukan untuk mengolah data, dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa dan menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data dalam penelitian ini adalah peneliti merangkum, memilahhal-hal yang pokok pada hal-hal yang penting dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi oleh peneliti, maka selanjutnya peneliti menyajikan data kedalam bentuk yang lebih sederhana seperti uraian ringkas, table informan, dan gambar kerangka fikir. Dengan demikian penyajian data akan sangat memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami oleh peneliti.

3. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini peneliti akan memperoleh kesimpulan yang tentative, kaku dan meragukan sehingga kesimpulan tersebut perlu di verifikasi, kesimpulan yang ditulis oleh peneliti senantiasa di verifikasi selama penelitian berlangsung agar kesimpulan yang dihasilkan tidak diragukan dan dapat dipercaya.

G. Pengabsahan Data

(Creswell, 2014), dalam bukunya "*Research Design: Qualitative, Qua*" keabsahan data (*validity*) mengacu pada sejauh mana hasil penelitian mencerminkan fenomena yang sebenarnya, serta sejauh mana instrumen pengumpulan data (seperti kuesioner, wawancara, atau observasi) dapat mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur. Creswell membagi validitas ke dalam beberapa jenis, seperti validitas internal (keakuratan hasil dalam konteks studi) dan validitas eksternal (generalisasi hasil ke populasi yang lebih luas). Pada penelitian ini peneliti menggunakan tiga macam triangulasi diantaranya yaitu :

1. Triangulasi Teknik

Yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

2. Triangulasi Waktu

Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas dapat dilakukan dengan cara pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu yang berbeda. Kepolisian merupakan salah satu lembaga milik pemerintah yang sangat amat penting keberadaannya di negara ini dan memiliki tanggung jawab secara langsung dibawah Presiden Indonesia. Diketahui sebagai penegak hukum, pengayom serta sebagai pelindung untuk masyarakat dan berfungsi sebagai pemelihara kedamaian dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) merupakan salah satu fungsi instansi pemerintah yaitu kepolisian.

3. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber yang berbeda untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan menyeluruh tentang fenomena yang sedang diteliti. Ini dilakukan untuk memverifikasi dan memperkuat temuan penelitian dengan cara yang lebih holistik.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Bone

Kabupaten Bone, yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan salah satu kabupaten terbesar di wilayah tersebut dengan luas wilayah mencapai ±4.559 km². Secara geografis, Kabupaten Bone berbatasan langsung dengan Teluk Bone di bagian timur, Kabupaten Soppeng dan Wajo di sebelah utara, Kabupaten Sinjai di selatan, serta Kabupaten Maros dan Gowa di sebelah barat. Dengan ibu kota yang terletak di Watampone, Bone memiliki sejarah panjang sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Bone, salah satu kerajaan besar di Sulawesi Selatan pada masa lampau.

Kabupaten Bone memiliki penduduk yang tersebar di berbagai kecamatan dengan keanekaragaman budaya, ekonomi, dan kondisi sosial. Salah satu tantangan utama di kabupaten ini adalah tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi. Berdasarkan data yang ada:

- a. Jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Bone tercatat sebanyak 547.126 jiwa, yang terdiri dari 192.078 keluarga.
- b. Di Kecamatan Tompobulu, terdapat 896 jiwa miskin yang tergabung dalam 313 keluarga.
- c. Di Kecamatan Libureng, terdapat 22.535 jiwa miskin, yang terdiri dari 8.265 keluarga.

Angka ini menunjukkan bahwa upaya penanganan kemiskinan masih

menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Bone. Program-program bantuan sosial dan ekonomi menjadi instrumen penting untuk mengurangi beban masyarakat miskin di wilayah ini.

Salah satu program unggulan pemerintah dalam mendukung masyarakat kurang mampu adalah Program Keluarga Harapan (PKH). PKH bertujuan untuk memberikan bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin guna meningkatkan taraf hidup dan memutus rantai kemiskinan antar-generasi. Berikut adalah data penerima PKH di beberapa desa di Kabupaten Bone:

Tabel 4 1. Penerima PKH Tahun 2024 Di Beberapa Desa di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone

Desa/Kelurahan	Jumlah Penerima PKH
Baringeng	136
Binuang	129
Bune	129
Cempaga	80
Laburasseng	139
Mallinrung	181
Mario	125
Mattiro Bulu	119
Mattiro Deceng	102
Mattirowalie	172
Pitumpidangge	53
Poleonro	78
Polewali	76
Ponre-Ponre	145
Suwa	27
Swadaya	93
Tanah Batue	124
Tappale	107
Tompobulu	99

wanuawaru	66
Total	2180

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bone (2024)

Berdasarkan data pada Tabel 4.1, distribusi penerima PKH di Kabupaten Bone tersebar di berbagai desa/kelurahan dengan jumlah yang bervariasi. Desa Mallinrung tercatat memiliki jumlah penerima PKH tertinggi, yaitu sebanyak 181 keluarga, diikuti oleh Desa Mattirowalie dengan 172 keluarga penerima, serta Desa Ponre-Ponre dengan 145 keluarga penerima. Sebaliknya, jumlah penerima terendah terdapat di Desa Suwa, yaitu hanya 27 keluarga, disusul oleh Desa Pitumpidangge dengan 53 keluarga, dan Desa Wanuwawaru dengan 66 keluarga. Variasi jumlah penerima PKH di setiap desa menunjukkan perbedaan tingkat kebutuhan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. Desa dengan jumlah penerima yang tinggi dapat diasumsikan memiliki tingkat kemiskinan yang lebih signifikan dibandingkan desa lainnya. Oleh karena itu, data ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi efektivitas program PKH dan menentukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi kemiskinan di wilayah tersebut secara lebih merata.

Kabupaten Bone menghadapi berbagai tantangan dalam mengurangi tingkat kemiskinan, seperti:

1. Akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang masih terbatas di beberapa wilayah.
2. Ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertanian tradisional yang rentan terhadap perubahan cuaca dan harga pasar.
3. Infrastruktur desa yang belum merata, terutama jalan dan sarana

transportasi.

Bone memiliki banyak potensi ekonomi yang dapat dioptimalkan untuk mengentaskan kemiskinan, seperti:

1. Sektor pertanian dan peternakan, termasuk produksi padi, jagung, dan hasil ternak seperti sapi dan kambing.
2. Pariwisata budaya yang dapat dikembangkan melalui promosi sejarah Kerajaan Bone.
3. Pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bone telah menginisiasi berbagai program untuk mengatasi kemiskinan, seperti:

1. Program subsidi dan bantuan sosial, termasuk PKH, bantuan pangan, dan subsidi pendidikan.
2. Pelatihan keterampilan kerja untuk masyarakat miskin agar mampu mandiri secara ekonomi.
3. Pembangunan infrastruktur di desa-desa terpencil guna meningkatkan aksesibilitas.

Kabupaten Bone memiliki tantangan yang signifikan terkait kemiskinan, namun dengan adanya berbagai program bantuan dan potensi ekonomi yang dimiliki, peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat cukup besar. Program-program seperti PKH menjadi solusi penting, meskipun harus didukung oleh upaya jangka panjang seperti peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Pemerintah dan masyarakat perlu

bekerja sama untuk mewujudkan Bone sebagai kabupaten yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.

2. Dinas Sosial Kabupaten Bone

a. Profil

Keberadaan Dinas Sosial Kabupaten Bone sebagai salah satu instansi dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Bone lahir tidak serta merta, akan tetapi mengalami sejarah panjang dalam perkembangannya dari masa ke masa dan telah beberapa kali mengalami perubahan secara organisasi kelembagaan yang pada mulanya dinamakan Inspeksi Sosial Repoeblik Indonesia (ISORI) sekitar tahun 1952 yang membawahi 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Bone, Soppeng, dan Wajo yang berkedudukan di Kabupaten Bone, dalam perkembangannya ISORI berubah menjadi Djawatan Sosial pada tahun 1954 – 1969 yang hanya meliputi wilayah Kabupaten Bone saja, setelah itu menjadi Kantor Departemen Sosial Kabupaten Bone sampai pada tahun 1999, sejalan dengan era Otonomi Daerah berdasarkan Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2001 dibentuklah Kantor Sosial Kabupaten Bone.

Sehubungan dengan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bone maka status Kantor Sosial ditingkatkan menjadi Badan Kesejahteraan Sosial dan Linmas Kabupaten Bone berdasarkan Perda No. 23 Tahun 2004.

Akibat dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang dibarengi dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan

antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dimana Sosial menjadi urusan wajib maka dibentuklah Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bone berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bone.

Pada Tahun 2014, Pemerintah mengeluarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap daerah, baik pemerintah propinsi maupun kabupaten/kota harus menyusun dan menyesuaikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru. Maka di Kabupaten Bone diterbitkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang diperkuat dengan Peraturan Bupati

Pada tahun 2020 kemudian diadakan lagi perubahan komposisi Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kabupaten Bone yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan atas Perda nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan dalam Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Dinas Sosial Kabupaten Bone dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 70 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bone.

Begitupun pada Tahun 2020, dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi tentang

Penyederhanaan Birokrasi maka diterbitkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone yang kemudian dijabarkan dalam Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Dinas Sosial Kabupaten Bone Peraturan Bupati Bone Nomor 72 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bone.

Mencermati hal tersebut diatas, Organisasi Kesejahteraan Sosial selalu berdiri sendiri selama pembentukannya hanya pernah sekali menggandeng unsur Linmas dalam Struktur Organisasinya.

Berkaitan dengan dasar hukum pembentukannya, maka untuk mewujudkan optimalnya kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bone dalam menyelenggarakan tugas-tugas di bidang Kesejahteraan Sosial yang bersih, bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

b. Visi dan Misi

Dinas Sosial Kabupaten Bone sejak periode baru Pemerintah Daerah Kabupaten Bone telah menjalankan dan berusaha mewujudkan Visi dan Misi sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bone sebagai berikut:

- 1) Visi: Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera
- 2) Misi:
 - a) Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut:
 - b) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan

bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

- c) Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- d) Meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya.
- e) Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
- f) Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
- g) Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Khusus bagi Dinas Sosial Kabupaten Bone jika dikaitkan dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, maka Dinas Sosial harus menjalankan visi terkait dengan visi Mandiri yang mengandung makna kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerja sama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan dan Sejahtera yang mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan

dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Hal ini juga sesuai yang tertuang dalam Misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih khususnya Misi yang ke-2 (kedua) yakni “Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.” dan Misi yang ke-3 (ketiga) yakni “Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.” Walaupun tidak bisa dinafikan bahwa dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial juga tidak terlepas dari visi kedua yakni visi Berdaya Saing.

c. Struktur Organisasi

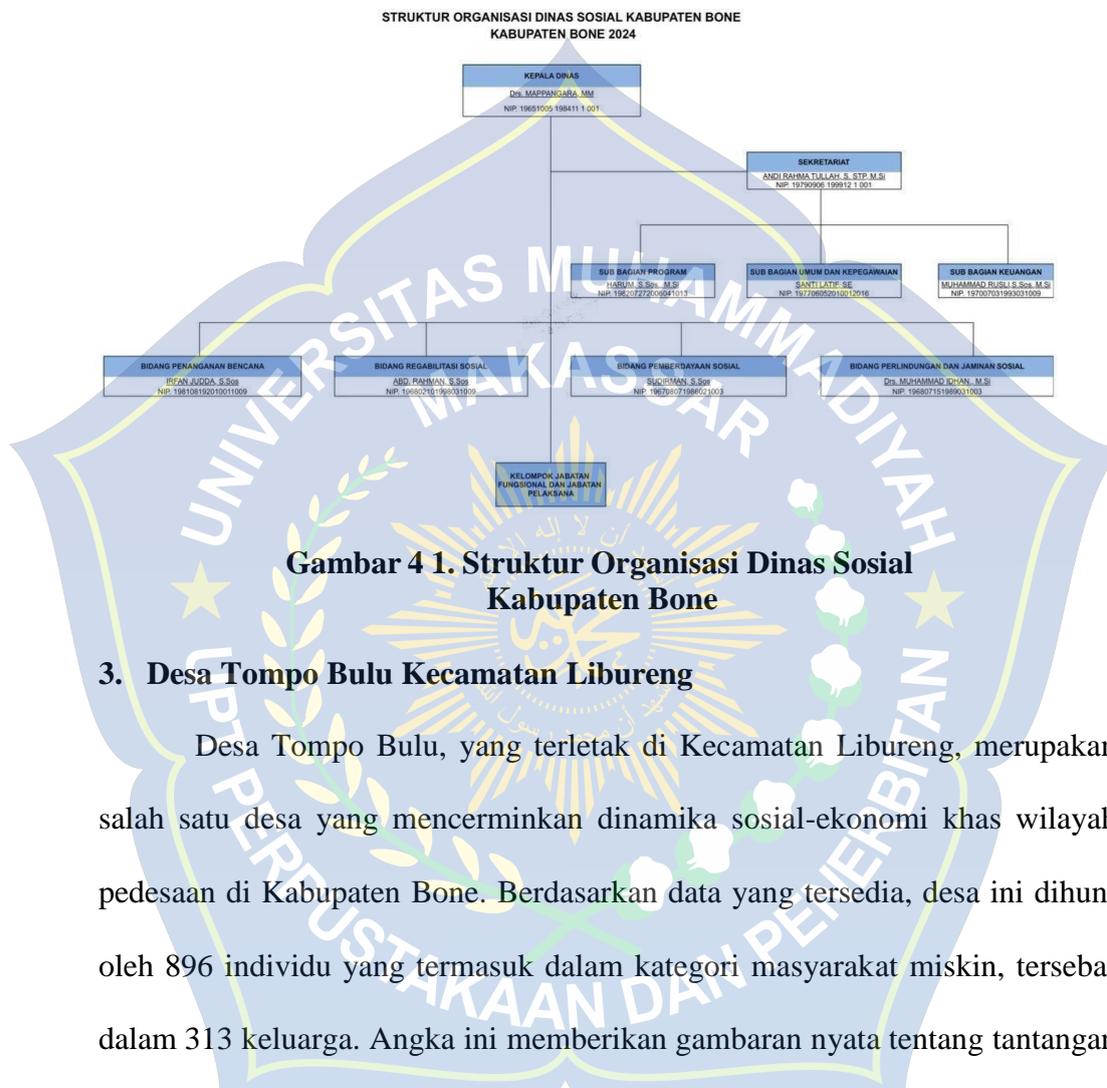
Adapun Susunan Perangkat Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bone yang baru dengan predikat Tipe A adalah sebagai berikut

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat Dinas terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Program
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c) Sub Bagian Keuangan
- 3) Bidang Penanganan Bencana terdiri dari:
 - a) Sub Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial

- b) Sub Koordinator Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana
 - c) Sub Koordinator Penanganan Warga Negara Korban Konflik Sosial dan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
- 4) Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari:
- a) Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Anak dan Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis
 - b) Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial lainnya
 - c) Sub Koordinator Bimbingan Sosial, Kemitraan dan Kerjasama Antar Lembaga.
- 5) Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri dari:
- a) Sub Koordinator Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Izin Pengumpulan Sumbangan
 - b) Sub Koordinator Pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
 - c) Sub Koordinator Kesetiakawanan Sosial, Kepahlawanan dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP)
- 6) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari:
- a) Sub Koordinator Pendataan dan Pengelolaan Data Fakir Miskin
 - b) Sub Koordinator Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 - c) Sub Koordinator Fasilitasi Bantuan Sosial Pengembangan

Ekonomi Masyarakat

7) UPTD kelompok jabatan pelaksana dan jabatan fungsional



**Gambar 4 1. Struktur Organisasi Dinas Sosial
Kabupaten Bone**

3. Desa Tompo Bulu Kecamatan Libureng

Desa Tompo Bulu, yang terletak di Kecamatan Libureng, merupakan salah satu desa yang mencerminkan dinamika sosial-ekonomi khas wilayah pedesaan di Kabupaten Bone. Berdasarkan data yang tersedia, desa ini dihuni oleh 896 individu yang termasuk dalam kategori masyarakat miskin, tersebar dalam 313 keluarga. Angka ini memberikan gambaran nyata tentang tantangan sosial yang dihadapi oleh masyarakat setempat, termasuk akses terhadap kebutuhan dasar, pendidikan, dan peluang ekonomi yang terbatas. Jika dibandingkan dengan data kemiskinan di seluruh Kecamatan Libureng, jumlah masyarakat miskin di desa ini adalah bagian dari total 22.535 individu miskin di kecamatan tersebut, yang mencakup 8.265 keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Tompo Bulu berkontribusi sekitar 4% terhadap total individu

miskin di kecamatan ini.

Secara geografis, Desa Tompo Bulu memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan, baik dari segi agraris maupun pariwisata pedesaan. Namun, tingginya angka kemiskinan menunjukkan bahwa upaya pembangunan yang lebih terarah dan inklusif masih sangat diperlukan. Tantangan seperti keterbatasan akses terhadap infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan menjadi faktor penghambat utama yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah maupun lembaga non-pemerintah.

Pemberdayaan masyarakat melalui program-program berbasis komunitas, seperti pelatihan keterampilan kerja, pengembangan usaha mikro, dan peningkatan akses terhadap pasar, dapat menjadi langkah strategis untuk mengurangi kemiskinan di Desa Tompo Bulu. Selain itu, sinergi antara pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten diperlukan untuk memastikan bahwa program-program pembangunan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran, sehingga masyarakat Desa Tompo Bulu dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik dan keluar dari jerat kemiskinan.

B. Hasil Penelitian

1. Pemahaman program bantuan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat kurang mampu di kecamatan libureng kabupaten Bone.

Pemahaman terhadap program bantuan sosial mengacu pada tingkat pengetahuan, wawasan, dan kesadaran masyarakat kurang mampu di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, tentang tujuan, mekanisme, dan

manfaat yang ditawarkan oleh program-program bantuan sosial yang dirancang oleh pemerintah maupun lembaga lainnya. Pemahaman ini mencakup informasi mendetail tentang jenis bantuan yang tersedia, seperti bantuan PKH, langsung tunai (BLT), bantuan sembako, atau program pendidikan, serta prosedur untuk mengaksesnya. Selain itu, pemahaman ini juga melibatkan kemampuan masyarakat untuk memahami syarat dan ketentuan penerima manfaat, sehingga mereka dapat mengikuti program dengan benar dan memaksimalkan potensi manfaat yang diterima. Dalam konteks ini, pemahaman masyarakat terhadap program tersebut menjadi kunci dalam menciptakan efektivitas program, karena kurangnya pemahaman sering kali menyebabkan rendahnya partisipasi atau bahkan salah sasaran dalam penerimaan bantuan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik menunjukkan adanya edukasi dan sosialisasi yang efektif dari pihak penyelenggara program bantuan sosial.

Berdasarkan wawancara dengan seorang penerima manfaat program bantuan sosial, ia menyampaikan,

"Program ini sangat membantu kami, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Namun, ada kalanya bantuan datang terlambat, dan kami harus menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut. Meski begitu, kami tetap bersyukur karena tanpa bantuan ini, kehidupan kami akan jauh lebih sulit."

(hasil wawancara UI tanggal 28 november 2024)

Hal ini mengindikasikan bahwa program bantuan sosial memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan. Meskipun ada tantangan terkait keterlambatan distribusi, beliau mengungkapkan rasa syukur karena bantuan ini meringankan beban hidupnya, yang menunjukkan bahwa masyarakat yang

kurang mampu tetap mengapresiasi program ini sebagai upaya positif pemerintah meski ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal ketepatan waktu pengiriman bantuan.

Peneliti juga mencari sumber dari warga lain, yang juga penerima bantuan sosial, memberikan pendapat serupa dengan warga sebelumnya menyatakan,

"Bantuan ini sangat berarti bagi keluarga kami. Anak-anak saya bisa tetap sekolah karena kami menggunakan sebagian uang untuk membeli perlengkapan sekolah. Namun, terkadang kami merasa bantuan kurang mencukupi untuk kebutuhan bulanan, apalagi jika harga barang naik."

(Hasil wawancara SH tanggal 28 november 2024),

Berdasarkan hasil wawancara di atas, narasumber menyoroti aspek lain dari program ini, yaitu manfaat yang dirasakan dalam mendukung pendidikan anak-anaknya. Namun, ia juga mencatat bahwa bantuan terkadang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan bulanan, terutama dalam situasi kenaikan harga barang. Hal ini mengungkapkan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial sebagai sumber utama pendapatan, serta perlunya penyesuaian jumlah bantuan agar lebih sesuai dengan kondisi ekonomi yang dinamis.

Berbeda dengan hal di atas, berikut adalah informasi yang disampaikan oleh seorang selaku masyarakat yang tidak menerima bantuan PKH:

"Saya merasa program PKH seharusnya mencakup lebih banyak keluarga seperti kami, karena keadaan ekonomi kami masih sulit."
(Hasil wawancara AR tanggal 29 november 2024)

Narasumber mengungkapkan keluhan mengenai ketidakadilan dalam penyaluran bantuan, mengingat ia merasa sangat membutuhkan tetapi tidak tercakup dalam penerima PKH. Namun berbeda dengan sorang penerima

bantuan social di sisi lain menyatakan sebagai berikut:

"Bantuan sosial memberikan sedikit keringanan untuk kebutuhan sehari-hari, meskipun tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga." (Hasil wawancara CG tanggal 29 november 2024)

Merasa terbantu dengan adanya bantuan sosial, namun mengakui bahwa jumlahnya tidak mencukupi untuk sepenuhnya memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Di sisi lain, dalam wawancara narasumber menyampaikan sebagai berikut:

"Bantuan sosial yang kami terima memberikan rasa aman, tapi saya juga merasa seharusnya ada orang lain yang lebih membutuhkan." (Hasil wawancara TI tanggal 1 desember)

Menerima bantuan sosial meskipun berada dalam kategori yang lebih mampu, dan merasa bahwa bantuan tersebut lebih baik disalurkan pada yang lebih membutuhkan. Selanjutnya, seorang pendamping atau fasilitator program bantuan sosial, menjelaskan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program,

"Sebagai pendamping, tugas saya adalah memastikan bahwa bantuan tepat sasaran. Namun, kami sering menghadapi kendala, seperti data penerima yang kurang akurat atau perubahan kondisi masyarakat yang tidak terdeteksi. Meskipun begitu, kami terus berupaya meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat agar bantuan ini benar-benar dirasakan manfaatnya." (Hasil wawancara tanggal 16 november 2024)

Menekankan pentingnya validitas data penerima dan pengawasan yang tepat agar bantuan sosial tepat sasaran. Ketidakakuratan data atau perubahan status penerima yang tidak terdeteksi menjadi salah satu tantangan besar dalam menjalankan program ini. Oleh karena itu, upaya edukasi dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme bantuan sosial menjadi sangat penting untuk memastikan bantuan dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Pengelola yang bertanggung jawab dalam bidang distribusi dan pemantauan program sosial di Dinas Sosial, juga menyoroti beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas distribusi bantuan. Ia menyatakan,

"Kami bekerja keras memastikan bantuan sampai tepat waktu dan sesuai sasaran. Namun, kendala seperti jarak geografis dan cuaca sering memengaruhi proses distribusi. Kami juga terus berupaya memperbarui data penerima agar bantuan lebih efektif." (Hasil wawancara APS tanggal 14 oktober 2024)

Beliau menjelaskan tantangan logistik yang dihadapi, terutama faktor geografis dan cuaca yang sering menghambat proses distribusi tepat waktu. Selain itu, pembaruan data penerima bantuan juga menjadi prioritas untuk memastikan program berjalan dengan lebih efektif. Hal ini menunjukkan bahwa kendala operasional dalam distribusi dan administrasi sangat mempengaruhi pelaksanaan program bantuan sosial, namun ada upaya yang terus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut melalui inovasi dan kerjasama antarinstansi terkait. Sejalan dengan hal tersebut, salah seorang yang juga merupakan pegawai dinas sosial kabupaten bone menyatakan bahwa

"Program bantuan sosial sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu. Namun, ada beberapa tantangan dalam distribusinya." (Hasil wawancara MI tanggal 14 oktober 2024)

Beliau menjelaskan bahwa meskipun bantuan sosial dapat membantu, ada tantangan dalam hal distribusi yang tepat sasaran dan efektivitas program. Hasil wawancara dengan para narasumber di atas menunjukkan bahwa program bantuan sosial di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar, mendukung pendidikan, dan

meringankan beban ekonomi. Penerima manfaat seperti yang disebutkan narasumber diatas menggambarkan bantuan ini sebagai upaya nyata pemerintah untuk mengatasi kemiskinan, meskipun terdapat tantangan seperti keterlambatan distribusi dan ketidak cukupan jumlah bantuan. Pendamping program, menekankan pentingnya validasi data dan edukasi masyarakat untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan dimanfaatkan secara optimal. Sementara itu pegawai lain memberikan gambaran tentang hambatan operasional yang dihadapi selama proses distribusi, termasuk kendala geografis dan cuaca. Secara keseluruhan, meskipun terdapat berbagai tantangan, pelaksanaan program ini telah memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat dan terus berupaya untuk ditingkatkan melalui pembaruan data, peningkatan koordinasi, dan inovasi dalam sistem distribusi.

2. Ketepatan sasaran bantuan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat kurang mampu di kecamatan libureng kabupaten Bone.

Ketepatan sasaran bantuan sosial mengacu pada sejauh mana program-program bantuan sosial berhasil mencapai kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan, yakni masyarakat kurang mampu yang tinggal di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone. Ketepatan sasaran ini ditentukan melalui mekanisme seleksi yang jelas dan berbasis data, seperti data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), atau informasi dari pemerintah desa. Proses ini melibatkan identifikasi penerima bantuan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, seperti tingkat pendapatan, kondisi rumah tangga, dan status pekerjaan. Ketepatan sasaran sangat penting

karena memastikan bahwa sumber daya yang terbatas dialokasikan secara efisien kepada mereka yang paling membutuhkan, sehingga mampu mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan secara signifikan. Kesalahan dalam menentukan sasaran, seperti memberikan bantuan kepada pihak yang tidak layak, dapat menurunkan kredibilitas program serta menghambat pencapaian tujuan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Seorang penerima bantuan sosial, menyatakan,

"Bantuan sosial yang saya terima cukup membantu, tetapi kadang tidak tepat waktu. Kadang ada tetangga yang seharusnya lebih membutuhkan malah tidak dapat bantuan. Dengan uang yang saya terima, saya gunakan untuk membeli kebutuhan pokok, namun tetap saja masih merasa kurang karena kebutuhan semakin meningkat." (Hasil wawancara UI pada tanggal 28 november 2024)

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa meskipun bantuan sosial yang diterima sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar, ada masalah ketepatan waktu penyaluran dan ketidaktepatan sasaran. Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam proses pendataan dan verifikasi penerima bantuan, yang menyebabkan beberapa individu yang lebih membutuhkan tidak menerima bantuan. Selain itu, jumlah bantuan yang diterima dianggap tidak mencukupi karena adanya peningkatan harga kebutuhan pokok, yang menunjukkan perlunya penyesuaian nominal bantuan sesuai dengan kondisi ekonomi terkini. Penerima bantuan sosial lainnya diidentifikasi sebagai kelompok yang memanfaatkan program tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan pengurangan beban ekonomi dalam jangka pendek maupun panjang,

"Saya bersyukur mendapatkan bantuan sosial, tapi masih ada kendala. Beberapa orang yang tidak seharusnya menerima malah dapat. Kadang bantuan itu tidak sesuai jadwal, dan saya harus meminjam uang dulu untuk beli beras atau kebutuhan lainnya." (Hasil wawancara SH tanggal 28 november 2024)

Pernyataan ini mempertegas masalah ketepatan sasaran yang juga disoroti, di mana beberapa individu yang tidak memenuhi kriteria malah menerima bantuan. Selain itu, masalah keterlambatan distribusi juga menjadi kendala utama yang memaksa masyarakat untuk mencari alternatif sementara, seperti berutang, demi memenuhi kebutuhan yang mendesak. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem distribusi yang perlu diperbaiki agar bantuan sosial lebih tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

MR sebagai fasilitator program bantuan sosial, menjelaskan,

"Kami sudah berusaha maksimal untuk memastikan bantuan tepat sasaran, tetapi data penerima kadang kurang akurat karena perubahan kondisi masyarakat yang tidak selalu terpantau. Kami juga menghadapi kendala logistik dan koordinasi dengan pihak distribusi, sehingga distribusi kadang terlambat." (Hasil wawancara MR tanggal 16 November)

Berbeda dengan beberapa narasumber di atas, salah seorang dalam sesi wawancara menyampaikan sebagai berikut:

"Saya berharap bisa mendapatkan bantuan karena kondisi ekonomi saya sangat sulit, tapi belum ada bantuan yang sampai." (Hasil wawancara AR tanggal 29 november 2024)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Terdapat masyarakat yang belum terdata atau tidak masuk kriteria yang ditentukan. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dan pembaruan data penerima bantuan secara berkala agar lebih inklusif dan adil. Selain itu, dalam sesi wawancara dengan narasumber lain

menyampaikan:

"Bantuan ini sangat membantu kami, apalagi saat harga kebutuhan pokok naik." (Hasil Wawancara CG tanggal 29 november 2024)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Bantuan sosial terbukti memberikan dampak positif bagi penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar. Hal ini mengindikasikan bahwa program ini penting bagi masyarakat kurang mampu, meskipun perlu peningkatan dalam pengelolaan. Namun hal berbeda disampaikan oleh narasumber dalam sesi wawancara dengan peneliti:

"Saya sebenarnya tidak merasa berhak, tapi saya tidak tahu bagaimana cara melaporkan agar bantuan diberikan ke yang lebih membutuhkan." (Hasil wawancara TI tanggal 1 desember 2024)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Masalah distribusi bantuan yang tidak tepat sasaran masih terjadi. Hal ini menyoroti perlunya mekanisme pelaporan yang lebih efektif dan edukasi kepada masyarakat agar bantuan tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh yang tidak memenuhi kriteria. Penjelasan dari pegawai, memberikan gambaran lebih dalam tentang kendala yang dihadapi dalam pendataan penerima bantuan. Perubahan dinamis dalam kondisi ekonomi masyarakat, seperti pergeseran status sosial, sering kali tidak terdeteksi oleh sistem pendataan yang ada. Selain itu, kendala logistik dan koordinasi antarinstansi menyebabkan keterlambatan distribusi bantuan. Hal ini mengindikasikan perlunya perbaikan dalam sistem pendataan berbasis teknologi yang dapat memantau perubahan kondisi masyarakat secara lebih akurat dan real-time, serta meningkatkan koordinasi antara instansi terkait untuk

memperlancar distribusi bantuan. Pegawai tersebut, yang bekerja di bidang distribusi dan pemantauan program sosial Dinas Sosial, mengatakan:

"Kami berupaya mendistribusikan bantuan secepat mungkin sesuai data yang ada, tetapi data yang kami terima sering tidak sesuai kondisi lapangan. Kami menerima laporan dari masyarakat dan fasilitator, tapi proses perbaikan data memakan waktu karena harus melalui prosedur yang panjang." (hasil wawancara MR tanggal 14 oktober 2024)

Menurut pandangannya, masalah utama dalam distribusi bantuan adalah ketidaksesuaian data yang diterima dengan kondisi lapangan yang sebenarnya. Meskipun laporan dari masyarakat dan fasilitator sudah diterima, perbaikan data membutuhkan waktu lama karena adanya prosedur administrasi yang panjang. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan perbaikan dalam sistem data dan prosedur administrasi agar bantuan dapat segera disalurkan kepada yang membutuhkan tanpa menunggu proses yang berlarut-larut. Sinergi yang lebih baik antara pendataan, distribusi, dan evaluasi akan sangat membantu dalam mengurangi ketimpangan dan memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Sejalan dengan hal tersebut, salah seorang pegawai dari dinas sosial kabupaten bone menyatakan sebagai berikut:

"Kami berusaha semaksimal mungkin menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan." (hasil wawancara MI tanggal 14 oktober 2024)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Bantuan sosial dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu. Namun, masih ada tantangan dalam memastikan data penerima selalu tepat sasaran, seperti adanya perubahan kondisi ekonomi penerima. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat dalam program bantuan sosial di Kecamatan

Libureng, Kabupaten Bone, ditemukan beberapa permasalahan utama yang memengaruhi ketepatan sasaran bantuan sosial. Dari sudut pandang penerima manfaat, bantuan sosial telah memberikan manfaat signifikan dalam memenuhi kebutuhan dasar, namun terdapat keluhan mengenai keterlambatan distribusi serta ketidak tepatan sasaran, di mana individu yang lebih membutuhkan sering kali tidak mendapatkan bantuan.

Fasilitator dan pihak distribusi juga mengakui bahwa kendala utama berasal dari keakuratan data penerima, yang tidak selalu mencerminkan kondisi aktual masyarakat akibat dinamika ekonomi dan sosial yang cepat berubah. Selain itu, koordinasi antarinstansi dan logistik penyaluran bantuan sering kali menjadi hambatan teknis yang memengaruhi efisiensi distribusi. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem pendataan dengan memanfaatkan teknologi yang dapat memperbarui data secara real-time, peningkatan kapasitas koordinasi antarinstansi, dan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme distribusi agar program bantuan sosial dapat lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu. Data berikut menggambarkan tingkat ketepatan sasaran dalam penyaluran Program Bantuan Sosial di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone. Informasi ini mencakup seberapa efektif program tersebut mencapai kelompok yang memang berhak menerima bantuan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Analisis terhadap data ini memberikan gambaran tentang kualitas pelaksanaan program, termasuk keberhasilan dalam menjangkau penerima yang membutuhkan serta potensi kendala atau kesenjangan yang mungkin terjadi. Dengan memahami data ini, evaluasi dapat

dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial di wilayah tersebut:

Tabel 4 2. Data Ketepatan Sasaran Penyaluran Program Bantuan Sosial

Tahun	Target jumlah penerima bantuan yang terdaftar	Jumlah terealisasi	Jumlah Tidak terealisasi	Persentase Ketepatan Sasaran (%)
2020	1.500	1.200	300	80
2021	1.600	1.280	320	80
2022	1.800	1.500	300	83
2023	2.000	1.720	280	86
2024	2.100	1.830	270	87

Sumber: Kecamatan Libureng (2024)

Pada tahun 2020, target penerima bantuan adalah 1.500 orang, namun yang terealisasi hanya 1.200 orang. Artinya, ada 300 orang yang berhak mendapatkan bantuan namun tidak terealisasi bias kita lihat dari persentase ketepatan sasaran sebesar 80%. Salah satu penyebabnya adalah adanya kesalahan dalam data penerima manfaat, seperti data alamat yang tidak valid. sehingga bantuan tidak dapat disalurkan kepada penerima yang berhak.

Pada tahun 2021, target penerima bantuan sebanyak 1600 data yang masuk. Dari jumlah data yang masuk tersebut yang tersalurkan hanya 1280 orang yang terealisasi. Lebih banyak yang tidak terealisasi daru tahun sebelumnya di sebabkan data yang msuk tidak sesuai kriteria program bantuan sosial, dari persentase ketepatan sasaran penerima bantuan sebear 80 % sama dari tahun sebelumnya. Begitupula pada tahun 2022 jumlah data yang masuk sebanyak 1800 orang namun yang terealisasi sebanyak 300 orang disebabkan masi bergantung dari data yang lama. Namun dari prsentase penerima manfaat dari tahun sebelumnya itu naik sebesar 83 %.

Pada tahun 2023 jumlah data penerima bantuan sosial bertambah sebanyak 200 orang dari tahun sebelumnya hanya 1800 sehingga tahun 2023 jumlah penerima mencapai 2000 orang. Dari jumlah tersebut sekitar 280 orang yang tidak mendapatkan bantuan di karenakan Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga. Sering kali kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga yang bertanggung jawab atas distribusi bantuan. Hal ini bisa mengarah pada ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan, karena data yang tidak konsisten atau tidak diperbarui secara rutin. Dari persentase penerima bantuan sebesar 86 % lebih baik dari tahun sebelumnya.

Bantuan terahir tahun 2024 sebanyak 2.100 bertambah 100 orang dari tahun sebelumnya. Jika kita lihat dari data penyaluran masih kita dapatkan penerima bantuan yang tidak mendapatkan haknya sesuai program. di sebabkn masih banyak kenala yang di dapatkan di lapangan salah satu Faktor dalah pengaruh Sosial dan Budaya, faktor sosial dan budaya bisa mempengaruhi siapa yang layak mendapatkan bantuan. Misalnya, adanya pengaruh keluarga atau kelompok tertentu dalam pemilihan penerima manfaat, sehingga mereka yang benar-benar membutuhkan bisa terabaikan. Meski telah banyak perbaikna masiah saja ada kendalah yang di dapatkan dilapangan sehingga dari keseluruhan data yang masuk belum bisa mencapai 100 % penerima manfaat. Tebukti selama 5 tahun bejalan program penerima bantuan, dan tahun 2024 ini sebesar 87 % yang mendapatkan bantuan selisih 27 % yang belum mendapatkan.

Sehingga hemat pandangan penulis dari program tersebut pengelolaan

belum maksimal secara signifikan dan masih banyak kendala yang didapatkan di lapangan.

3. Ketepatan waktu program bantuan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat kurang mampu di kecamatan libureng kabupaten Bone.

Ketepatan waktu dalam pelaksanaan program bantuan sosial merujuk pada kemampuan pihak penyelenggara untuk mendistribusikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Ketepatan waktu ini mencakup beberapa aspek, seperti kesiapan administrasi, koordinasi antar lembaga, serta logistik yang mendukung kelancaran distribusi. Bantuan yang diberikan tepat waktu sangat krusial, terutama dalam situasi darurat seperti pandemi atau bencana alam, di mana masyarakat membutuhkan bantuan dengan segera untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jika program bantuan sosial mengalami keterlambatan, dampaknya bisa sangat signifikan, seperti meningkatnya kerentanan ekonomi dan sosial pada kelompok sasaran. Oleh karena itu, ketepatan waktu pelaksanaan program menjadi salah satu indikator keberhasilan yang menunjukkan adanya perencanaan yang matang, sistem pengelolaan yang efisien, dan pengawasan yang ketat. Seorang penerima bantuan sosial di Kecamatan Libureng, mengungkapkan bahwa meskipun bantuan sosial sering terlambat datang, ia tetap merasa terbantu dengan adanya bantuan tersebut.

"Bantuan sosial yang saya terima sering datang terlambat, namun ketika datang, cukup membantu meringankan beban ekonomi saya," (hasil wawancara UI tanggal 28 november 2024)

Beliau menjelaskan bahwa meskipun bantuan sosial datang terlambat, bantuan tersebut tetap memberikan manfaat besar bagi keluarga dan dirinya dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan kesehatan. Keterlambatan yang terjadi seringkali disebabkan oleh prosedur administratif yang membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga bantuan tidak selalu tepat waktu. Meskipun demikian, bantuan tersebut sangat berarti bagi masyarakat kurang mampu di Libureng. Beliau menambahkan bahwa ketepatan waktu dalam penyaluran sangat penting, karena jika terlambat, banyak keluarga yang terpaksa berhutang atau mengurangi kebutuhan lain, yang dapat berpengaruh pada kualitas hidup mereka. Penerima bantuan sosial, menyampaikan pandangannya mengenai hal yang sama.

"Bantuan sosial memang kadang terlambat datang, tapi saat sudah diterima, kami merasa sangat terbantu untuk membeli kebutuhan pokok yang semakin mahal,". (Hasil wawancara SH tanggal 28 november 2024)

Mengungkapkan bahwa meskipun bantuan sosial sering datang terlambat, bantuan tersebut memberikan dampak positif bagi kehidupan sehari-hari, terutama dalam kondisi ekonomi yang semakin sulit, dengan harga barang yang terus naik. Bantuan sosial menjadi penyelamat bagi mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Beliau menyebutkan bahwa terkadang keterlambatan disebabkan oleh proses verifikasi data yang masih harus diperbaiki, sehingga berdampak pada keterlambatan pencairan dana. Namun, meskipun ada kekurangan dalam ketepatan waktu, bantuan sosial tetap sangat bermanfaat dan membantu mereka bertahan. Berbeda dengan kedua narasumber di atas, salah seorang bapak dalam sesi wawancara menyampaikan sebagai berikut:

"Saya merasa kecewa karena bantuan sering datang terlambat, bahkan ada yang tidak tepat sasaran." (hasil wawancara AR tanggal 29 november 2024)

Dia merasa bahwa program ini masih perlu perbaikan, terutama dalam hal pendataan penerima. Menurutnya, masyarakat yang benar-benar membutuhkan sering terlewat, sementara yang lebih mampu justru mendapat bantuan. Namun salah seorang narasumber dalam sesi wawancaranya memaparkan bahwa:

"Alhamdulillah, bantuan sering datang tepat waktu. Ini sangat membantu, terutama untuk kebutuhan sehari-hari." (Hasil wawancara CG tanggal 29 november 2024)

Merasa puas dengan program bantuan sosial yang diterimanya. Dia mengapresiasi pemerintah atas ketepatan waktu pengiriman bantuan, meskipun terkadang ada kendala kecil yang bisa dimaklumi. Namun hal berbeda disampaikan warga lain dalam sesi wawancara dengan peneliti:

"Saya terima bantuan, tapi sebenarnya saya malu karena saya tahu ada yang lebih membutuhkan." (Hasil wawancara TI tanggal 1 desember 2024)

Beliau Mengakui bahwa dia menerima bantuan, meskipun merasa bahwa dirinya bukan penerima yang seharusnya. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan akurasi dalam proses pendataan untuk menghindari pemberian bantuan yang tidak sesuai. Pegawai, sebagai fasilitator program bantuan sosial, menjelaskan tantangan yang dihadapi dalam hal ketepatan waktu distribusi bantuan.

"Ketepatan waktu penyaluran bantuan sosial sering terkendala oleh faktor administratif dan mekanisme distribusi yang cukup kompleks, namun kami terus berusaha untuk mempercepat proses tersebut, (Hasil wawancara MR tanggal 16 november 2024)

Menjelaskan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyaluran bantuan sosial adalah kompleksitas proses administrasi dan verifikasi data yang dilakukan oleh pemerintah. Meski demikian, pihaknya bersama dengan tim di lapangan terus berusaha memperbaiki sistem agar bantuan dapat sampai tepat waktu. Dia menambahkan bahwa sebagai fasilitator, mereka juga bekerja sama dengan pihak terkait seperti Dinas Sosial untuk memastikan proses distribusi berjalan lancar. Namun, dalam beberapa kasus, kendala teknis dan logistik masih menjadi hambatan utama dalam memastikan ketepatan waktu. Kendala lainnya adalah adanya ketidaktepatan data penerima yang menyebabkan penundaan dalam penyaluran bantuan. Pegawai yang bekerja di bidang distribusi dan pemantauan program sosial di Dinas Sosial, juga memberikan pandangannya terkait masalah distribusi bantuan sosial.

"Secara keseluruhan, distribusi bantuan sosial di Kecamatan Libureng sudah cukup baik, meski memang ada kendala teknis yang menyebabkan keterlambatan. Kami berusaha untuk memperbaiki sistem agar bantuan lebih cepat diterima masyarakat," (Hasil wawancara tanggal 14 oktober 2024)

Menjelaskan bahwa pihak Dinas Sosial berusaha keras untuk memastikan bahwa bantuan sosial sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dengan tepat waktu. Namun, menurutnya, kendala yang sering dihadapi adalah masalah logistik dan ketepatan data yang menjadi salah satu penyebab utama keterlambatan. Juga menyebutkan bahwa proses verifikasi data yang dilakukan secara manual dapat memakan waktu lama, dan terkadang ada penerima yang tidak terdaftar dengan baik dalam sistem. Walaupun demikian, Dinas Sosial terus melakukan upaya perbaikan, termasuk memperbaiki sistem

pendataan dan memfasilitasi proses distribusi agar lebih efisien. Sejalan dengan itu dalam wawancara lain menyampaikan sebagai berikut:

"Kami selalu berusaha agar bantuan sosial tepat waktu. Namun, ada kendala administratif seperti verifikasi data yang memakan waktu."
(Hasil wawancara MI tanggal 14 oktober 2024)

Beliau menjelaskan bahwa keterlambatan biasanya disebabkan oleh proses administrasi yang memerlukan ketelitian untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Upaya seperti koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan untuk mempercepat proses. Berdasarkan wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan sosial di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, dapat disimpulkan bahwa ketepatan waktu dalam penyaluran bantuan sosial masih menjadi masalah utama yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat kurang mampu. Meskipun keterlambatan tersebut sering terjadi, dampak positif dari bantuan sosial tetap signifikan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Kendala utama yang dihadapi berkaitan dengan proses administratif yang kompleks, kesulitan dalam verifikasi data penerima bantuan, serta masalah logistik yang menyebabkan penyaluran sering terlambat. Para penerima bantuan mengakui bahwa meskipun bantuan tidak selalu tepat waktu, namun sangat membantu meringankan beban ekonomi mereka, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok yang semakin meningkat.

Di sisi lain, pihak yang terlibat dalam distribusi bantuan mengungkapkan bahwa mereka terus berupaya memperbaiki sistem distribusi agar bantuan dapat sampai tepat waktu. Namun, kendala teknis dan administratif yang ada memerlukan waktu untuk diselesaikan. Secara

keseluruhan, meskipun ada keterlambatan dalam penyaluran, bantuan sosial masih sangat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu di Kecamatan Libureng.

Data statistik menunjukkan tren perbaikan dalam ketepatan waktu penyaluran bantuan sosial di Kecamatan Libureng. Biasanya disalurkan dalam bentuk tunai setiap tahun, namun dengan frekuensi yang lebih spesifik. Secara umum, bantuan ini diberikan dalam beberapa tahap sepanjang tahun ampai tahun 2023.

Tahun pertama tahap penyaluran biasanya dilakukan setiap 3 bulan sekali, sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan pemerintah. Tahun kedua hingga seterusnya Pembayaran PKH dilaksanakan dalam empat tahap yang terbagi per trimester, yaitu pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Pembayaran dilakukan melalui Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dengan menggunakan kartu bantuan yang diberikan kepada penerima manfaat.

Penyaluran Berdasarkan Kategori Keluarga Penerima PKH memberikan bantuan berdasarkan kelompok keluarga penerima dengan kategori seperti keluarga dengan ibu hamil, balita, anak sekolah, penyandang disabilitas, atau lansia. Setiap kategori keluarga ini memiliki nilai bantuan yang berbeda dan bisa menerima penyaluran dalam jumlah yang disesuaikan dengan kelompok masing-masing.

Distribusi Melalui Bank dan Agen: Penyaluran dana bantuan PKH dilakukan melalui mekanisme transfer langsung ke rekening penerima atau melalui agen bank yang telah ditunjuk. Penerima manfaat biasanya diberikan

kartu yang berfungsi untuk menarik bantuan atau melakukan transaksi.

Meski demikian, penerima bantuan tahun 2020 yang tereleasisi dan penyalurannya tepat waktu sebesar 75% disebabkan prosedur administrasi, verifikasi data yang memakan waktu. Sehingga sebesar 25% penerima manfaat terlambat mendapatkan bantuan. Dari kendala tersebut telah dilakukan upaya perbaikan sistem pendapatan dan verifikasi data yang memakan waktu. Belajar pengalaman dari tahun sebelumnya sehingga pada tahun 2021 penyaluran yang tepat waktu mulai ada peningkatan sebesar 80% dari tahun sebelumnya namun pengelola bantuan masih mendapatkan kendala dalam penyaluran bantuan salah satu faktor penyebabnya adalah kendala teknis, masalah logistik dan distribusi yang lambat yang berpengaruh kepada terlambatnya bantuan sampai dalam persentase sebanyak 20% tidak tepat waktu.

Pada tahun 2022 penyaluran tidak tepat waktu bertambah dari tahun sebelumnya. Di tahun 2022 sebanyak 30% keterlambatan dalam penyalurannya. Sehingga yang tersalurkan pada tahun 2022 hanya sebesar 70%. Dari permasalahan yang peneliti dapatkan adalah proses administrasi yang dianggap rumit oleh pengelola tingkat bawah karena masih terdapat pengelola yang belum melek teknologi.

Belajar dari tahun sebelumnya pengelola program PKH tahun 2023 sebesar 78% yang tepat waktu. Meski bertambah sebanyak 8% kendala masih saja terus didapatkan. Pada tahun 2023 pengelola melakukan verifikasi data manual sehingga 25% penerima manfaat tidak mendapatkan bantuan tepat waktu. Dari permasalahan itu pengelola bantuan PKH menambah tenaga fasilitator

dengan harapan masalah -masalah sebelumnya yang terjadi itui kita dapat minimalisir sebaik mungkin.

Pada tahun 2024 jumlah penerima manfaat sebanyak 1830 penerima dengan persentase 72 % bantuan tepat waktu berarti 28 % penerima manfaat lambat mendapatkan bantuanya. Meski dari tahun sebelumnya harpannya segal permasalahan dapat di atasi semaksimal mungkin. Namun pada tahun 2024 salah penyebab adalah ketidak sinkronan data penerima sehingga menghambat turunnya bantuan tepat waktu.

wawancara dengan penerima bantuan dan pihak terkait menyoroti bahwa tantangan seperti verifikasi data dan kendala teknis masih perlu mendapatkan perhatian. Penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat waktu dapat semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu.

4. Pencapaian tujuan program bantuan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat kurang mampu di kecamatan libureng kabupaten Bone.

Pencapaian tujuan program bantuan sosial mengacu pada tingkat keberhasilan program dalam memenuhi sasaran utama yang telah ditetapkan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone. Tujuan ini biasanya mencakup pengurangan angka kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, serta penguatan daya tahan ekonomi rumah tangga penerima manfaat. Untuk mengevaluasi pencapaian ini, digunakan indikator-indikator spesifik, seperti peningkatan pendapatan, akses terhadap pendidikan dan layanan

kesehatan, serta ketersediaan kebutuhan pokok. Keberhasilan pencapaian tujuan juga bergantung pada kesesuaian desain program dengan kebutuhan lokal, partisipasi aktif masyarakat, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Dalam konteks ini, pencapaian tujuan mencerminkan sejauh mana program mampu membawa perubahan positif yang nyata dan berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat penerima manfaat. Wawancara dengan, seorang masyarakat penerima bantuan sosial, mengungkapkan bahwa

"Saya merasa sangat terbantu dengan bantuan sosial yang diberikan, karena saya bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bantuan seperti sembako dan uang tunai sangat meringankan beban hidup, apalagi saya hanya bekerja serabutan." (Hasil wawancara UI tanggal 28 november 2024)

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa program bantuan sosial memberikan dampak positif yang signifikan bagi penerima manfaat, terutama bagi mereka yang memiliki pendapatan tidak tetap. Bantuan berupa sembako dan uang tunai membantu memenuhi kebutuhan dasar yang mendesak. Meskipun demikian, wawancara ini juga menyoroti bahwa bantuan tersebut masih bersifat sementara dan belum mampu meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan, terutama dalam hal kemandirian ekonomi. Selanjutnya, wawancara dengan penerima bantuan sosial lainnya, mengungkapkan,

"Bantuan ini bagus untuk kebutuhan dasar, tetapi kadang pembagiannya tidak tepat waktu. Saya berharap ada pelatihan atau program yang bisa membantu kami memiliki keterampilan tambahan." (hasil wawancara SH tanggal 28 november 2024)

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun bantuan sosial bermanfaat,

pelaksanaannya menghadapi tantangan logistik, seperti keterlambatan distribusi bantuan. juga mengusulkan adanya program pelatihan keterampilan yang bisa memberikan tambahan nilai ekonomi bagi penerima bantuan. Ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik, di mana selain pemenuhan kebutuhan dasar, pemberdayaan masyarakat menjadi aspek yang penting dalam program bantuan sosial. Namun hal berbeda disampaikan narasumber dalam sesi wawancara dengan peneliti:

"Saya sebenarnya berharap mendapatkan bantuan, karena keadaan ekonomi kami sulit. Tapi saya diberitahu bahwa nama saya tidak masuk dalam daftar penerima." (Hasil wawancara AR tanggal 29 november 2024)

Hasil wawancara di atas Menggambarkan bahwa proses seleksi penerima bantuan masih memiliki kekurangan, seperti ada masyarakat yang membutuhkan tetapi tidak terdaftar sebagai penerima bantuan. Namun hal berbeda disampaikan dalam sesi wawancara lain dengan peneliti:

"Saya merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan ini. Uang yang saya terima biasanya digunakan untuk kebutuhan pokok seperti beras dan minyak." (Hasil wawancara CG tanggal 29 november 2024)

Hasil wawancara di atas Mengindikasikan bahwa program bantuan social efektif dalam meringankan kebutuhan sehari-hari penerima, meskipun mungkin masih ada kekurangan pada cakupannya. Hal berbeda juga disampaikan narasumber dalam sesi wawncaranya dengan peneliti:

"Saya sendiri heran kenapa saya mendapatkan bantuan, padahal menurut saya ada orang lain yang lebih membutuhkan." (Hasil wawancara TI tanggal 1 desember 2024)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Menunjukkan adanya

masalah dalam validasi data penerima, di mana masyarakat yang tergolong mampu juga menerima bantuan, sehingga perlu evaluasi mendalam pada sistem pendataan. Wawancara dengan, seorang pendamping program, memberikan wawasan mengenai tantangan dalam pelaksanaan program. menyatakan,

"Kami selalu berusaha memastikan bahwa bantuan sampai kepada yang benar-benar membutuhkan. Namun, tantangan seperti kurangnya data akurat sering kali menjadi hambatan." (hasil wawancara MR tanggal 16 november 2024)

Hal ini mengungkapkan adanya kendala dalam hal pendataan yang tepat, yang dapat mengarah pada ketidaktepatan sasaran dalam distribusi bantuan. Meskipun demikian, narasumber dengan timnya terus berupaya agar bantuan sampai kepada yang membutuhkan. Wawancara ini menekankan pentingnya sistem manajemen data yang lebih akurat dan koordinasi yang lebih baik antar instansi terkait untuk memastikan efektivitas program. Terakhir, wawancara dengan pegawai di bidang distribusi dan pemantauan program sosial Dinas Sosial, mengungkapkan,

"Program ini telah mencapai banyak hal, tetapi kami masih menghadapi kritik mengenai mekanisme pengawasan dan evaluasi. Kami berupaya memperbaiki prosedur untuk memastikan efektivitasnya."

(Hasil wawancara APS tersebut tanggal 14oktober 2024)

Dari perspektif instansi yang terlibat dalam pelaksanaan program, meskipun ada banyak pencapaian, tantangan utama terletak pada mekanisme pengawasan dan evaluasi program. Kritik yang diterima terkait dengan transparansi dan akuntabilitas menunjukkan perlunya penyempurnaan dalam sistem pemantauan dan evaluasi dampak program.

Dengan upaya untuk memperbaiki prosedur ini, diharapkan program bantuan sosial dapat lebih efektif dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Hal yang sama juga disampaikan narasumber selaku pegawai dinas sosial dalam sesi wawancara:

"Program bantuan sosial bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat kurang mampu. Namun, kami akui ada beberapa kendala seperti data yang kurang akurat sehingga distribusi belum sepenuhnya tepat sasaran."

(Hasil wawancara MI tanggal 14 oktober 2024)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa program bantuan sosial dirancang untuk membantu masyarakat, tetapi akurasi data menjadi hambatan dalam implementasi. Pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem pendataan.

Berdasarkan wawancara dengan para responden, pencapaian tujuan program bantuan sosial di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, secara umum menunjukkan keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat kurang mampu. Sebagian Responden mengapresiasi manfaat langsung yang dirasakan dari bantuan sembako dan uang tunai, tetapi keduanya juga menggaris bawahi perlunya program lanjutan untuk mendukung pemberdayaan dan kemandirian ekonomi. Perspektif sebagai pendamping program menyoroti pentingnya peningkatan akurasi data dan efektivitas pendistribusian, sedangkan dari Dinas Sosial menggaris bawahi perlunya perbaikan dalam pengawasan dan evaluasi program untuk memastikan keberlanjutan dan transparansi. Kesimpulannya, meskipun program ini berhasil dalam aspek jangka pendek, masih ada ruang untuk

pengembangan dalam hal pemberdayaan masyarakat, pengelolaan data, dan optimalisasi mekanisme pelaksanaan guna mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat penerima manfaat.

Berikut adalah Tabel Statistik Pencapaian Tujuan Program Bantuan Sosial di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone (2019-2024).

Tabel 4 3. Tabel Statistik Pencapaian Tujuan Program Bantuan Sosial di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone (2019-2024)

Tahun	Jumlah Penerima Bantuan	Pengurangan Angka	Peningkatan Akses	Peningkatan Akses	Tingkat Kepuasan
		Kemiskinan (%)	Pendidikan (%)	Kesehatan (%)	Penerima (%)
2019	1.500	5.2	10.3	8.5	72
2020	1.800	5.7	11.8	9.2	75
2021	2.000	6.3	13.2	10.1	78
2022	2.300	7.1	14.7	11.3	81
2023	2.500	7.9	16.0	12.5	84
2024	2.800	8.4	17.5	13.2	87

Sumber: Kecamatan Libureng (2024)

Pencapaian program bantuan sosial dalam kurun waktu lima tahun terakhir di Kecamatan Libureng menunjukkan tren positif dalam berbagai aspek. Berdasarkan data statistik, jumlah penerima bantuan meningkat dari 1.500 pada tahun 2019 menjadi 2.800 pada tahun 2024. Hal ini diiringi dengan pengurangan angka kemiskinan yang konsisten setiap tahunnya, dari 5,2% pada 2019 menjadi 8,4% pada 2024. Akses terhadap pendidikan juga meningkat signifikan, dengan kenaikan dari 10,3% pada 2019 menjadi 17,5% pada 2024. Peningkatan akses layanan kesehatan mencerminkan hasil yang serupa, dari 8,5% menjadi 13,2% pada periode yang sama. Tingkat kepuasan penerima bantuan pun terus mengalami kenaikan, mencapai 87% pada tahun 2024.

Namun, hasil wawancara memberikan perspektif yang lebih mendalam mengenai implementasi program ini. Misalnya, menyatakan bahwa bantuan sosial sangat membantu dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari, terutama bagi mereka yang memiliki pendapatan tidak tetap. Akan tetapi, sebagaimana diungkapkan oleh, tantangan logistik seperti keterlambatan distribusi menjadi kendala yang perlu diatasi. Selain itu, wawancara dengan Bapak mengungkapkan bahwa proses seleksi penerima bantuan masih memiliki kekurangan, sehingga masyarakat yang membutuhkan terkadang tidak terdaftar sebagai penerima. Perspektif lain mengindikasikan perlunya validasi data penerima untuk menghindari ketidaktepatan sasaran.

Di sisi lain, wawancara dengan pendamping program dan pegawai Dinas Sosial menunjukkan bahwa meskipun ada banyak pencapaian, tantangan utama terletak pada akurasi data dan mekanisme pengawasan. Mereka juga menyoroti pentingnya memperbaiki sistem pendataan dan evaluasi untuk memastikan distribusi bantuan lebih tepat sasaran dan transparan.

Secara keseluruhan, meskipun program ini telah menunjukkan dampak positif dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat kurang mampu, wawancara dengan para responden menggarisbawahi perlunya perbaikan dalam aspek pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan data. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek tetapi juga mendukung keberlanjutan kesejahteraan penerima di masa depan.

5. Perubahan nyata program bantuan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat kurang mampu di kecamatan libureng kabupaten Bone

Perubahan nyata program bantuan sosial merujuk pada dampak konkret yang dirasakan oleh masyarakat kurang mampu di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, setelah menerima manfaat dari program bantuan sosial. Perubahan ini dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, seperti peningkatan pendapatan keluarga, perbaikan kondisi rumah tinggal, akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta peningkatan rasa aman dan keberdayaan masyarakat. Perubahan nyata juga mencakup penurunan angka kemiskinan, peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), dan pengurangan ketimpangan sosial di wilayah tersebut. Selain itu, dampak positif dari program bantuan sosial juga dapat terlihat dalam jangka panjang, seperti terciptanya peluang usaha baru, penguatan komunitas lokal, dan pengurangan ketergantungan pada bantuan.

Keberhasilan dalam menciptakan perubahan nyata ini menunjukkan bahwa program bantuan sosial tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga memberikan solusi yang berkelanjutan bagi permasalahan kemiskinan di Kecamatan Libureng.

Wawancara, seorang masyarakat penerima bantuan sosial, mengungkapkan bahwa ia merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan sosial.

"Saya merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan sosial ini. Sebelumnya, saya kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama untuk membeli beras dan kebutuhan pokok lainnya. Setelah menerima bantuan, beban saya menjadi lebih ringan. Dengan adanya uang tunai dan juga sembako yang saya terima setiap bulan, saya bisa lebih fokus mencari pekerjaan lain untuk menambah penghasilan keluarga," (Hasil wawancara UI pada tanggal 28 november 2024)

Bantuan sosial yang diterima memberikan dampak langsung dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok. Program ini meringankan beban finansial dan memberikan kesempatan bagi penerima untuk mencari sumber pendapatan lain yang lebih produktif, meningkatkan kualitas hidup mereka dalam jangka panjang. seorang penerima bantuan sosial lainnya, berbagi pandangannya tentang manfaat bantuan tersebut bagi keluarganya.

"Bantuan sosial ini sangat membantu keluarga saya, terutama anak-anak saya yang masih sekolah. Dengan adanya bantuan ini, saya bisa membeli perlengkapan sekolah dan biaya transportasi mereka ke sekolah. Bantuan ini juga membuat kami tidak terlalu khawatir dengan kebutuhan makan sehari-hari karena ada sembako yang diterima setiap bulan,". (Hasil wawancara SH tanggal 28 november 2024)

Perspektif lain menunjukkan bahwa bantuan sosial tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, tetapi juga memberikan dukungan penting terhadap sektor pendidikan. Alokasi untuk perlengkapan sekolah dan transportasi anak-anak memperlihatkan bahwa bantuan sosial memiliki dampak yang lebih luas, tidak hanya mengatasi masalah konsumtif tetapi juga mendukung perkembangan sumber daya manusia melalui pendidikan.

Namun opini berbeda disampaikan dalam sesi wawancara:

"Kami yang tidak menerima bantuan PKH merasa sedikit kecewa karena kadang-kadang ada yang lebih mampu justru mendapat bantuan."
(Hasil wawancara AR tanggal 29 november 2024)

Beliau mengungkapkan adanya ketidakadilan dalam pendataan penerima bantuan. Ia berharap verifikasi data penerima dapat dilakukan lebih cermat agar lebih tepat sasaran. Namun hal berbeda juga disampaikan narasumber lain dalam sesi wawancara:

"Alhamdulillah, bantuan ini sangat membantu saya dan keluarga, terutama untuk kebutuhan anak-anak sekolah dan kebutuhan pokok sehari-hari." (Hasil wawancara CG tanggal 29 november 2024)

Beliau merasakan manfaat besar dari bantuan tersebut, terutama dalam mendukung pendidikan anak-anaknya, meskipun ada beberapa kendala teknis dalam pencairan bantuan. Berbeda dalam sesi wawancara menyampaikan sebagai berikut:

"Kami memang menerima bantuan, tapi sebenarnya kondisi kami sudah cukup baik. Mungkin ada yang lebih membutuhkan bantuan ini daripada kami." (Hasil wawancara TI tanggal 1 desember 2024)

Beliau menyadari ketidak tepatan data yang menyebabkan dirinya mendapatkan bantuan, meskipun ia merasa hal ini karena kekeliruan pendataan sebelumnya. Seorang pendamping atau fasilitator program bantuan sosial, menjelaskan tantangan yang dihadapi dalam implementasi program tersebut.

"Kami melihat bahwa banyak penerima bantuan yang merasa sangat terbantu, terutama untuk kebutuhan pokok mereka. Namun, tantangan terbesar adalah memastikan bantuan ini tepat sasaran. Kami sebagai pendamping terus memantau dan memberikan edukasi kepada penerima agar bantuan ini tidak hanya habis untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga digunakan untuk hal-hal yang produktif,"(Hasil wawancara MR tanggal 16 november 2024)

Pemantauan dan edukasi menjadi aspek penting dalam memastikan efektivitas program bantuan sosial. Tantangan terbesar, yaitu memastikan distribusi tepat sasaran, memerlukan upaya kolaboratif dan penggunaan data yang akurat agar bantuan tidak hanya memberikan solusi jangka pendek, tetapi mendorong perubahan yang lebih berkelanjutan dan produktif bagi penerima. Yang bekerja di bidang distribusi dan pemantauan program sosial di Dinas Sosial, menambahkan pandangannya tentang peran pemerintah dalam kelancaran distribusi bantuan sosial.

"Kami memastikan distribusi bantuan berjalan lancar dan tepat waktu. Program ini dirancang untuk membantu masyarakat miskin keluar dari kesulitan ekonomi. Salah satu kendala yang kami hadapi adalah kurangnya koordinasi antar instansi dan tantangan geografis di beberapa wilayah terpencil. Namun, kami terus berupaya agar setiap bantuan yang diberikan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," (hasil wawancara APS tanggal 14 oktober 2024)

Menekankan pentingnya koordinasi yang baik antara berbagai instansi pemerintah serta pemecahan tantangan geografis dalam mendistribusikan bantuan secara efektif. Keberhasilan program ini sangat tergantung pada sinergi yang kuat antara pihak terkait agar bantuan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat, khususnya mereka yang berada di wilayah terpencil. Sejalan dengan yang juga merupakan pegawai dinas sosial kabupaten bone menyatakan sebagai berikut:

"Program bantuan sosial seperti PKH di Kecamatan Libureng telah memberikan dampak nyata dalam mengurangi beban ekonomi masyarakat kurang mampu." (hasil wawancara MI tanggal 14 oktober 2024)

Menjelaskan bahwa bantuan ini membantu memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, meskipun distribusinya perlu ditingkatkan agar lebih merata. Program bantuan sosial di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu. Berdasarkan wawancara, penerima manfaat seperti menunjukkan peningkatan kualitas hidup terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok dan dukungan pendidikan anak. Hal ini mencerminkan bahwa program ini memberikan manfaat langsung yang relevan dengan kebutuhan dasar mereka. Di sisi lain, dari perspektif pendamping dan pengelola program, Terlihat bahwa upaya untuk memastikan manfaat bantuan lebih bersifat

produktif dan tepat sasaran menjadi prioritas utama. Edukasi kepada penerima dan distribusi yang efisien menjadi kunci keberhasilan program ini. Meskipun demikian, beberapa kendala seperti tantangan geografis dan koordinasi antar instansi masih menjadi hambatan yang perlu diatasi. Dengan adanya pemantauan yang lebih intensif dan sinergi antar pemangku kepentingan, program ini memiliki potensi untuk menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin di wilayah tersebut.

Berikut adalah tabel data statistik yang menunjukkan perubahan nyata dalam program bantuan sosial terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, selama lima tahun terakhir. Data ini mencerminkan upaya berkelanjutan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan melalui berbagai skema bantuan, seperti bantuan langsung tunai, program keluarga harapan, dan subsidi pangan. Selama periode tersebut, terlihat adanya tren positif dalam pengurangan angka kemiskinan dan peningkatan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar. Namun, data ini juga mengungkapkan tantangan yang dihadapi, termasuk fluktuasi penerima bantuan akibat dinamika sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. Program bantuan sosial tidak hanya memberikan dampak langsung berupa peningkatan pendapatan keluarga, tetapi juga mendorong masyarakat untuk lebih mandiri secara ekonomi. Di Kecamatan Libureng, beberapa penerima bantuan telah memanfaatkan dana yang diterima untuk mengembangkan usaha kecil, seperti perdagangan dan pertanian, yang menjadi sumber pendapatan baru bagi

keluarga mereka. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pelaksanaan yang tepat sasaran, program bantuan sosial dapat menjadi katalisator bagi transformasi sosial ekonomi yang lebih luas. Namun demikian, efektivitas program ini tetap memerlukan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat yang membutuhkan, sambil terus memitigasi risiko ketergantungan jangka panjang terhadap bantuan.:

Tabel 4 4. Tabel Data Statistik Mengenai Perubahan Nyata Program Bantuan Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kurang Mampu di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penerima Bantuan Sosial	1.200	1.250	1.300	1.350	1.400
Persentase Penerima yang Mengalami Peningkatan Pendapatan	45%	48%	50%	52%	55%
Persentase Penerima yang Mengalami Peningkatan Akses Pendidikan	35%	37%	40%	42%	45%
Persentase Penerima yang Mengalami Peningkatan Kesehatan	40%	42%	45%	47%	50%
Penurunan Angka Kemiskinan (%)	4%	5%	6%	7%	8%
Peningkatan IPM (%)	2%	3%	4%	5%	6%

Sumber: Kecamatan Libureng (2024)

Berdasarkan wawancara dengan beberapa penerima bantuan sosial, perubahan nyata yang dirasakan dalam kehidupan mereka sangat mencolok, terutama dalam hal peningkatan pemenuhan kebutuhan pokok dan pendidikan anak. Penerima bantuan menunjukkan bahwa bantuan sosial memberikan

dampak langsung dalam mengurangi beban ekonomi mereka, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan dan pendidikan. Hal ini sejalan dengan data statistik yang menunjukkan peningkatan jumlah penerima bantuan sosial dan persentase mereka yang mengalami peningkatan pendapatan dan akses pendidikan.

Namun, beberapa penerima mengungkapkan bahwa mereka merasa bantuan ini tidak tepat sasaran, karena kondisi ekonomi mereka sudah cukup baik. Opini ini mencerminkan tantangan dalam pendataan penerima yang masih perlu perbaikan, seperti yang juga disampaikan oleh narasumber. Keberhasilan program ini dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada akurasi data dan verifikasi penerima bantuan yang lebih cermat.

Pernyataan ini menggaris bawahi pentingnya edukasi dan pemantauan untuk memastikan bantuan tidak hanya digunakan untuk konsumsi, tetapi juga dapat meningkatkan produktivitas ekonomi penerima. Meskipun tantangan geografis dan koordinasi antar instansi masih menjadi kendala, secara keseluruhan, data statistik dan wawancara menunjukkan bahwa program bantuan sosial telah memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone.

Hal ini juga didukung oleh data BPS Periode 2020-2023 terkait dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bone yang diluhut dari berbagai aspek pada tabel berikut:

**Tabel 4 5. Tabel Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Bone
Periode 2020-2023**

Indikator	2020	2021	2022	2023
Angka Melek Huruf (%)	95.5	95.7	95.9	96.1
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8.2	8.3	8.4	8.5
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4.5	4.3	4.2	4.0
Persentase Penduduk Miskin (%)	10.5	10.3	10.1	9.8
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68.5	69.0	69.5	70.0

Sumber: BPS.go.id (2024)

Tabel 4.5 menunjukkan perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bone selama periode 2020 hingga 2023 berdasarkan beberapa indikator. Angka melek huruf menunjukkan tren peningkatan dari 95,5% pada tahun 2020 menjadi 96,1% pada tahun 2023, mencerminkan peningkatan akses terhadap pendidikan dasar. Rata-rata lama sekolah juga mengalami peningkatan yang konsisten dari 8,2 tahun pada tahun 2020 menjadi 8,5 tahun pada tahun 2023, menunjukkan adanya perbaikan dalam partisipasi pendidikan formal. Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan penurunan dari 4,5% pada tahun 2020 menjadi 4,0% pada tahun 2023, yang mengindikasikan perbaikan di sektor ketenagakerjaan. Selain itu, persentase penduduk miskin mengalami penurunan dari 10,5% pada tahun 2020 menjadi 9,8% pada tahun 2023, mencerminkan pengurangan angka kemiskinan di daerah tersebut. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meningkat dari 68,5 pada tahun 2020 menjadi 70,0 pada tahun 2023 mencerminkan kemajuan signifikan dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bone mengalami tren positif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat selama periode yang dianalisis.

C. Pembahasan

1. Pemahaman program bantuan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat kurang mampu di kecamatan libureng kabupaten Bone.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa program bantuan sosial di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar, mendukung pendidikan, dan meringankan beban ekonomi. Penerima manfaat menggambarkan bantuan ini sebagai upaya nyata pemerintah untuk mengatasi kemiskinan, meskipun terdapat tantangan seperti keterlambatan distribusi dan ketidakcukupan jumlah bantuan.

Pendamping program menekankan pentingnya validasi data dan edukasi masyarakat untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan dimanfaatkan secara optimal. memberikan gambaran tentang hambatan operasional yang dihadapi selama proses distribusi, termasuk kendala geografis dan cuaca. Secara keseluruhan, meskipun terdapat berbagai tantangan, pelaksanaan program ini telah memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat dan terus berupaya untuk ditingkatkan melalui pembaruan data, peningkatan koordinasi, dan inovasi dalam sistem distribusi

Pemahaman tentang program bantuan sosial di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone dapat dianalisis melalui teori efektivitas program yang dikemukakan oleh Richard M. Steers. Dalam teori ini, efektivitas program dilihat dari pencapaian tujuan yang telah ditetapkan serta kemampuan sistem

dalam menanggulangi masalah yang ada di lapangan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, program bantuan sosial di Kecamatan Libureng menunjukkan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu. Para penerima manfaat, menyatakan bahwa bantuan sosial ini telah berhasil memenuhi kebutuhan dasar mereka, mendukung pendidikan anak-anak, dan meringankan beban ekonomi mereka, yang sesuai dengan tujuan program tersebut untuk mengurangi kemiskinan. Hal ini menggambarkan bahwa tujuan jangka pendek program, seperti pemenuhan kebutuhan pokok, telah tercapai.

Namun, meskipun dampak positif tersebut terlihat, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi untuk meningkatkan efektivitas program ini. Misalnya, adanya masalah dalam distribusi bantuan, seperti keterlambatan pengiriman dan ketidakcukupan jumlah bantuan yang diterima oleh masyarakat. Tantangan operasional seperti ini dapat mengurangi tingkat kepuasan penerima manfaat, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut. Kendala geografis dan cuaca, merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi kelancaran distribusi. Oleh karena itu, efektivitas program ini terpengaruh oleh faktor-faktor yang berada di luar kontrol langsung pelaksana program, meskipun langkah-langkah untuk mengatasi kendala tersebut sudah mulai diterapkan.

Pendamping program, menekankan pentingnya validasi data yang akurat dan edukasi masyarakat untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan dimanfaatkan secara optimal. Validasi data menjadi krusial dalam

konteks ini karena ketepatan data akan menentukan apakah bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.

Dengan adanya validasi yang lebih baik, bantuan sosial dapat lebih efektif dalam mengurangi kesenjangan sosial. Peningkatan koordinasi antar pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, lembaga sosial, dan masyarakat, juga menjadi salah satu upaya untuk memperbaiki efektivitas program. Meskipun tantangan yang ada masih cukup besar, pembaruan data dan inovasi dalam sistem distribusi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program bantuan sosial di masa depan.

Dalam konteks teori efektivitas Richard M. Steers, program bantuan sosial di Kecamatan Libureng sudah menunjukkan pencapaian tujuan yang signifikan, namun untuk mencapai tingkat efektivitas yang lebih tinggi, perlu ada upaya berkelanjutan untuk mengatasi berbagai hambatan yang ada. Koordinasi yang lebih baik, peningkatan system distribusi, dan perbaikan dalam validasi data merupakan langkah-langkah penting yang perlu terus diperbaiki.

Program ini menegaskan bahwa efektivitas tidak hanya diukur dari jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi juga dari ketepatan sasaran serta dampak jangka panjang yang dihasilkan. Bantuan yang diterima harus mampu mengatasi kebutuhan mendesak sekaligus menjadi langkah awal untuk pemberdayaan masyarakat. Dengan distribusi yang tepat, program ini dapat menciptakan perubahan nyata yang berkelanjutan, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan..

2. Ketepatan sasaran bantuan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan

Masyarakat kurangmampu di kecamatan libureng kabupaten Bone.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat dalam program bantuan sosial di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, ditemukan beberapa permasalahan utama yang memengaruhi ketepatan sasaran bantuan sosial. Dari sudut pandang penerima manfaat, bantuan sosial telah memberikan manfaat signifikan dalam memenuhi kebutuhan dasar, namun terdapat keluhan mengenai keterlambatan distribusi serta ketidaktepatan sasaran, di mana individu yang lebih membutuhkan sering kali tidak mendapatkan bantuan.

Fasilitator dan pihak distribusi juga mengakui bahwa kendala utama berasal dari keakuratan data penerima, yang tidak selalu mencerminkan kondisi aktual masyarakat akibat dinamika ekonomi dan sosial yang cepat berubah. Selain itu, koordinasi antarinstansi dan logistik penyaluran bantuan sering kali menjadi hambatan teknis yang memengaruhi efisiensi distribusi. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem pendataan dengan memanfaatkan teknologi yang dapat memperbarui data secara real-time, peningkatan kapasitas koordinasi antarinstansi, dan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme distribusi agar program bantuan sosial dapat lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu.

Penilaian terhadap ketepatan sasaran bantuan sosial di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, memerlukan pendekatan yang lebih mendalam melalui teori efektivitas program yang dikemukakan oleh Richard M. Steers. Steers menyarankan bahwa efektivitas program dapat diukur berdasarkan

sejauh mana tujuan program tercapai, kualitas pelaksanaan, serta dampak yang dirasakan oleh penerima manfaat. Berdasarkan wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat dalam distribusi bantuan sosial, beberapa faktor krusial yang memengaruhi ketepatan sasaran dapat dianalisis menggunakan prinsip-prinsip teori efektivitas program tersebut.

Pertama, dalam perspektif penerima manfaat, bantuan sosial memang memberikan manfaat yang signifikan, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Hal ini menunjukkan bahwa program tersebut memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat miskin, tetapi efektivitas program terganggu oleh adanya keterlambatan dalam distribusi serta ketidaktepatan sasaran. Individu yang lebih membutuhkan sering kali tidak menerima bantuan tepat waktu atau dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Ketidakakuratan data penerima manfaat menjadi salah satu penyebab utama dari ketidaktepatan sasaran ini. Menurut Steers, ketepatan sasaran merupakan bagian integral dari efektivitas program, yang artinya jika sasaran tidak tercapai dengan tepat, maka tujuan utama program tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu menjadi terganggu. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas program, perlu dilakukan pembaruan data secara berkala dan lebih akurat, yang mencerminkan perubahan sosial dan ekonomi masyarakat.

Selanjutnya, masalah yang dihadapi oleh fasilitator dan pihak distribusi adalah kendala dalam koordinasi antarinstansi dan pengelolaan logistik yang memengaruhi proses distribusi. Steers menekankan pentingnya koordinasi dan

komunikasi antarindividu dan antarinstitusi dalam mencapai tujuan program. Ketidaktepatan koordinasi ini menyebabkan distribusi bantuan tidak berjalan lancar dan tidak sampai kepada pihak yang membutuhkan dengan efisien. Dalam hal ini, efektivitas distribusi terganggu oleh masalah teknis dan manajerial yang dapat diperbaiki dengan peningkatan kapasitas koordinasi antarinstitusi yang lebih baik. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan membangun mekanisme komunikasi yang lebih jelas antara pemerintah daerah, lembaga sosial, dan masyarakat penerima bantuan.

Akhirnya, evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme distribusi perlu dilakukan agar dapat mengidentifikasi permasalahan lebih jauh serta mengimplementasikan perbaikan yang lebih sistematis. Menurut Steers, evaluasi yang komprehensif adalah kunci untuk mengetahui sejauh mana program telah berjalan efektif dan apa saja kendala yang perlu diperbaiki. Evaluasi ini harus dilakukan secara rutin dengan melibatkan berbagai pihak yang berkompeten untuk memastikan bahwa bantuan sosial mencapai kelompok yang paling membutuhkan dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan mereka. Dengan demikian, untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial di Kecamatan Libureng, perbaikan dalam sistem pendataan, koordinasi antarinstitusi, serta evaluasi berkelanjutan akan sangat berperan dalam meningkatkan efektivitas program bantuan sosial tersebut.

3. Ketepatan waktu program bantuan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat kurang mampu di kecamatan libureng

kabupaten Bone.

Berdasarkan wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan sosial di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, dapat disimpulkan bahwa ketepatan waktu dalam penyaluran bantuan sosial masih menjadi masalah utama yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat kurang mampu. Meskipun keterlambatan tersebut sering terjadi, dampak positif dari bantuan sosial tetap signifikan bagi masyarakat yang membutuhkan. Kendala utama yang dihadapi berkaitan dengan proses administratif yang kompleks, kesulitan dalam verifikasi data penerima bantuan, serta masalah logistik yang menyebabkan penyaluran sering terlambat. Para penerima bantuan mengakui bahwa meskipun bantuan tidak selalu tepat waktu, namun sangat membantu meringankan beban ekonomi mereka, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok yang semakin meningkat. Di sisi lain, pihak yang terlibat dalam distribusi bantuan mengungkapkan bahwa mereka terus berupaya memperbaiki sistem distribusi agar bantuan dapat sampai tepat waktu. Namun, kendala teknis dan administratif yang ada memerlukan waktu untuk diselesaikan. Secara keseluruhan, meskipun ada keterlambatan dalam penyaluran, bantuan sosial masih sangat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu di Kecamatan Libureng.

Ketepatan waktu dalam penyaluran bantuan sosial merupakan faktor penting dalam efektivitas program tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu. Berdasarkan wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan sosial di Kecamatan Libureng,

Kabupaten Bone, ditemukan bahwa meskipun keterlambatan sering terjadi, dampak positif dari bantuan sosial tetap signifikan.

Dalam konteks ini, teori efektivitas program yang dikemukakan oleh Richard M. Steers dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana ketepatan waktu berperan dalam mencapai tujuan program sosial. Teori ini menekankan pada hubungan antara tujuan yang ingin dicapai, sumber daya yang tersedia, dan hasil yang diinginkan. Ketepatan waktu dalam pelaksanaan program dapat mempengaruhi tingkat pencapaian tujuan secara keseluruhan, karena apabila bantuan sosial terlambat disalurkan, dampaknya terhadap penerima bantuan menjadi terhambat, mengurangi potensi peningkatan kesejahteraan mereka.

Penyebab keterlambatan penyaluran bantuan sosial di Kecamatan Libureng terkait dengan proses administratif yang kompleks, kesulitan dalam verifikasi data penerima bantuan, dan masalah logistik. Proses administratif yang rumit seringkali menyebabkan keterlambatan dalam menentukan siapa yang berhak menerima bantuan, sementara masalah verifikasi data penerima juga memerlukan waktu yang lebih lama, sehingga penyaluran bantuan tidak dapat dilakukan tepat waktu. Selain itu, kendala logistik dalam distribusi barang juga berkontribusi terhadap keterlambatan tersebut. Dalam perspektif teori Steers, hal ini mengindikasikan adanya ketidakefektifan dalam penggunaan sumber daya yang ada, baik dari segi waktu maupun tenaga yang dialokasikan untuk menyelesaikan hambatan-hambatan ini.

Meskipun demikian, dampak positif dari bantuan sosial tetap terasa. Para

penerima bantuan, mengakui bahwa meskipun bantuan sosial tidak selalu diterima tepat waktu, bantuan tersebut tetap memberikan manfaat besar dalam mengurangi beban ekonomi mereka, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok yang semakin meningkat. Ini menunjukkan bahwa meskipun ketepatan waktu adalah faktor penting dalam efektivitas program, manfaat yang dirasakan masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada waktu yang tepat. Namun, efektivitas program akan semakin optimal apabila bantuan sosial dapat disalurkan tepat waktu, mengingat kebutuhan mendesak yang dimiliki masyarakat kurang mampu.

Para pihak yang terlibat dalam distribusi bantuan, terus berupaya memperbaiki sistem distribusi untuk memastikan bantuan dapat disalurkan tepat waktu. Meskipun kendala teknis dan administratif masih menjadi tantangan, upaya perbaikan ini mencerminkan komitmen terhadap peningkatan efektivitas program. Dalam kerangka teori efektivitas Richard M. Steers, upaya perbaikan ini dapat dipandang sebagai langkah untuk meningkatkan alokasi sumber daya, memperbaiki proses yang ada, dan mengoptimalkan hasil yang diinginkan, yaitu kesejahteraan masyarakat kurang mampu. Proses ini membutuhkan waktu untuk diselesaikan, namun perbaikan yang dilakukan menunjukkan adanya potensi untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial di masa depan.

Secara keseluruhan, meskipun ada keterlambatan dalam penyaluran, bantuan sosial tetap memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu di Kecamatan Libureng. Program ini

masih memiliki potensi besar untuk menjadi lebih efektif apabila masalah administratif dan logistik dapat diatasi, sehingga ketepatan waktu dapat terjaga. Dalam hal ini, teori efektivitas Steers memberikan perspektif yang berguna untuk menganalisis pentingnya ketepatan waktu dalam pencapaian tujuan program, yang dalam hal ini adalah kesejahteraan masyarakat kurang mampu.

4. Pencapaian tujuan program bantuan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat kurang mampu di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.

Berdasarkan wawancara dengan para responden, pencapaian tujuan program bantuan sosial di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, secara umum menunjukkan keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat kurang mampu. Responden mengapresiasi manfaat langsung yang dirasakan dari bantuan sembako dan uang tunai, tetapi keduanya juga menggarisbawahi perlunya program

lanjutan untuk mendukung pemberdayaan dan kemandirian ekonomi. Perspektif dari pendamping program menyoroti pentingnya peningkatan akurasi data dan efektivitas pendistribusian, sedangkan dari Dinas Sosial menggarisbawahi perlunya perbaikan dalam pengawasan dan evaluasi program untuk memastikan keberlanjutan dan transparansi. Kesimpulannya, meskipun program ini berhasil dalam aspek jangka pendek, masih ada ruang untuk pengembangan dalam hal pemberdayaan masyarakat, pengelolaan data, dan optimalisasi mekanisme pelaksanaan guna mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat penerima manfaat.

Hal ini sejalan dengan teori efektivitas program yang dikemukakan oleh Richard M. Steers, yang menekankan bahwa efektivitas sebuah program dapat diukur melalui sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Berdasarkan pandangan penerima bantuan sembako dan uang tunai yang disalurkan telah memberikan manfaat langsung bagi mereka, namun keduanya juga menyoroti pentingnya adanya program lanjutan yang tidak hanya sekadar memberikan bantuan sementara tetapi juga mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ini mencerminkan salah satu aspek dari efektivitas program menurut Steers, yakni pentingnya tujuan jangka panjang yang tidak hanya terfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar tetapi juga pada peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat sebagai salah satu indikator keberhasilan yang lebih menyeluruh.

Dari sudut pandang pendamping program, terdapat perhatian terhadap pentingnya akurasi data dan efektivitas dalam pendistribusian bantuan. Hal ini sangat relevan dengan prinsip efektivitas yang dikemukakan oleh Steers, di mana pengumpulan data yang tepat dan distribusi yang efisien dapat memperbesar kemungkinan tercapainya tujuan program, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu. Tanpa pengelolaan data yang baik, efektivitas suatu program bisa terhambat, yang tercermin dalam pernyataan Muh.rakib yang mengingatkan pentingnya perbaikan dalam hal ini. Sementara itu, staf Dinas Sosial mengungkapkan kebutuhan akan peningkatan dalam pengawasan dan evaluasi program. Dalam teori efektivitas Steers, pengawasan dan evaluasi merupakan bagian integral dari memastikan bahwa tujuan program

dapat tercapai secara berkelanjutan. Tanpa evaluasi yang memadai, sulit untuk mengetahui apakah program tersebut sudah berjalan dengan baik atau perlu perbaikan, serta apakah manfaat yang diberikan benar-benar dirasakan oleh masyarakat sasaran.

Kesimpulannya, meskipun program bantuan sosial di Kecamatan Libureng telah berhasil dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat kurang mampu dalam jangka pendek, berdasarkan teori efektivitas program Richard M. Steers, masih terdapat ruang untuk pengembangan lebih lanjut. Beberapa aspek yang perlu ditingkatkan adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengelolaan data yang lebih akurat, serta penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi program. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga dapat memberikan dampak yang lebih berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Penguatan elemen-elemen tersebut akan membawa program ini lebih dekat pada tujuan akhir yang diinginkan, yakni kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat kurang mampu di Kecamatan Libureng.

5. Perubahan nyata program bantuan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat kurang mampu di kecamatan libureng kabupaten Bone

Program bantuan sosial di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu. Berdasarkan wawancara menunjukkan peningkatan kualitas

hidup terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok dan dukungan pendidikan anak. Hal ini mencerminkan bahwa program ini memberikan manfaat langsung yang relevan dengan kebutuhan dasar mereka. Di sisi lain, dari perspektif pendamping dan pengelola program, terlihat bahwa upaya untuk memastikan manfaat bantuan lebih bersifat produktif dan tepat sasaran menjadi prioritas utama. Edukasi kepada penerima dan distribusi yang efisien menjadi kunci keberhasilan program ini. Meskipun demikian, beberapa kendala seperti tantangan geografis dan koordinasi antar instansi masih menjadi hambatan yang perlu diatasi. Dengan adanya pemantauan yang lebih intensif dan sinergi antar pemangku kepentingan, program ini memiliki potensi untuk menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin di wilayah tersebut.

Berdasarkan teori efektivitas program yang dikemukakan oleh Richard M. Steers, efektivitas suatu program dapat diukur dari sejauh mana program tersebut mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta dampak positif yang ditimbulkannya pada kelompok sasaran. Dalam konteks program bantuan sosial ini, peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu tercermin dari perbaikan yang dialami oleh penerima manfaat. Mereka mengalami peningkatan kualitas hidup, yang terlihat jelas pada pemenuhan kebutuhan pokok seperti pangan dan tempat tinggal, serta dukungan dalam aspek pendidikan anak-anak mereka. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa program bantuan sosial di Kecamatan Libureng mampu memberikan manfaat langsung yang relevan dengan kebutuhan dasar penerima, yang merupakan salah satu indikator

efektivitas program.

Selain itu, dalam pengelolaan program ini, perhatian terhadap aspek efisiensi dan ketepatan sasaran juga menjadi fokus utama. Menurut Steers, untuk mencapai efektivitas, penting bagi setiap elemen yang terlibat dalam pelaksanaan program untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan dan mekanisme operasional yang tepat. Hal ini terlihat dari upaya yang dilakukan oleh pendamping dan pengelola program, yang berfokus pada edukasi kepada penerima manfaat dan memastikan distribusi bantuan berjalan dengan efisien. Upaya ini sejalan dengan prinsip efektivitas yang menekankan pentingnya perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terorganisir, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan.

Dengan memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat mengenai bagaimana bantuan sosial dapat digunakan dengan maksimal, program ini berhasil menciptakan dampak produktif bagi penerima manfaat, yang tidak hanya mengandalkan bantuan, tetapi juga mendorong mereka untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.

Namun, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini juga tidak dapat diabaikan. Salah satu hambatan yang masih ditemukan adalah tantangan geografis yang mempengaruhi distribusi bantuan, serta adanya kendala dalam koordinasi antar instansi terkait. Menurut Steers, efektivitas program juga sangat bergantung pada koordinasi dan komunikasi yang baik antara semua pihak yang terlibat. Hal ini menjadi penting karena tanpa sinergi yang optimal, hambatan-hambatan seperti kesulitan geografis dan administrasi

dapat mengurangi dampak positif yang diharapkan dari program. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya pemantauan yang lebih intensif dan koordinasi yang lebih baik antar pemangku kepentingan, baik dari pemerintah daerah, lembaga sosial, maupun masyarakat setempat. Pemantauan yang ketat akan memastikan bahwa bantuan sosial sampai pada sasaran dengan tepat dan tepat waktu, sehingga meningkatkan efektivitas program.

Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan yang harus dihadapi, program bantuan sosial di Kecamatan Libureng memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan. Dengan penanganan yang lebih sistematis dan koordinasi yang lebih baik antara pihak terkait, program ini dapat berkontribusi lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu, serta mempercepat proses pemberdayaan ekonomi mereka. Mengacu pada teori efektivitas program dari Richard M. Steers, dapat disimpulkan bahwa program ini telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam mencapai tujuannya, namun masih membutuhkan penyempurnaan dalam hal koordinasi dan pelaksanaan agar hasil yang dicapai lebih pasti.

Ketika hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat dikategorikan cukup sejahtera, namun di sisi lain jumlah penerima bantuan terus bertambah setiap tahun, hal ini bisa disebabkan oleh perbedaan dalam definisi dan indikator yang digunakan untuk menilai kesejahteraan. Penilaian kesejahteraan sering kali didasarkan pada indikator makro seperti pendapatan per kapita, tingkat pendidikan, akses kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi. Indikator-indikator ini

mungkin menunjukkan tren positif secara umum, tetapi tidak selalu mencerminkan distribusi kesejahteraan secara merata di seluruh kelompok masyarakat. Akibatnya, meskipun angka-angka makro menunjukkan peningkatan kesejahteraan, kelompok tertentu masih mengalami kerentanan ekonomi yang membuat mereka bergantung pada bantuan sosial.

Selain itu, peningkatan jumlah penerima bantuan juga dapat disebabkan oleh perubahan dalam kebijakan atau kriteria penerima bantuan. Pemerintah atau lembaga terkait mungkin memperluas cakupan bantuan sosial untuk mencakup lebih banyak kelompok rentan, termasuk mereka yang berada di ambang garis kemiskinan. Dengan demikian, meskipun jumlah penerima bantuan meningkat, hal ini tidak selalu berarti terjadi penurunan kesejahteraan secara keseluruhan. Sebaliknya, ini bisa menjadi indikator bahwa sistem bantuan sosial telah menjadi lebih inklusif dan mampu menjangkau kelompok-kelompok yang sebelumnya tidak teridentifikasi sebagai penerima bantuan.

Fenomena ini juga dapat mencerminkan tantangan dalam stabilitas ekonomi rumah tangga. Banyak keluarga yang berada di kategori "cukup sejahtera" sebenarnya berada di posisi rentan, di mana mereka mudah jatuh kembali ke kemiskinan akibat tekanan ekonomi seperti inflasi, kehilangan pekerjaan, atau bencana alam. Dalam situasi ini, meskipun mereka dianggap cukup sejahtera berdasarkan data penelitian, ketergantungan pada bantuan sosial menjadi mekanisme untuk menjaga daya tahan mereka terhadap tekanan ekonomi. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang lebih holistik dalam mengevaluasi kesejahteraan masyarakat, tidak hanya dari angka-angka

makro, tetapi juga dari kondisi riil masyarakat di lapangan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Program bantuan sosial di Kecamatan Libureng telah memberikan dampak positif dengan membantu masyarakat kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar dan meringankan beban ekonomi. Namun, tantangan seperti keterlambatan distribusi dan ketidakcukupan bantuan tetap ada. Pendamping program menekankan pentingnya validasi data dan edukasi masyarakat agar bantuan lebih tepat sasaran dan dimanfaatkan optimal.
2. Beberapa masalah terkait ketepatan sasaran bantuan sosial ditemukan, seperti keterlambatan distribusi dan ketidaktepatan sasaran. Keakuratan data penerima bantuan menjadi kendala utama, yang sering tidak mencerminkan kondisi aktual. Koordinasi antarinstansi dan logistik distribusi juga menjadi hambatan. Sistem pendataan perlu diperbaiki dengan teknologi real-time dan koordinasi lebih baik agar bantuan lebih efektif.
3. Keterlambatan dalam penyaluran bantuan sosial di Kecamatan Libureng masih menjadi masalah utama, meskipun dampak positifnya tetap signifikan. Kendala administratif dan logistik sering menyebabkan keterlambatan. Meskipun demikian, pihak terkait berupaya memperbaiki sistem distribusi agar bantuan bisa sampai tepat waktu. Program ini tetap penting bagi kesejahteraan masyarakat meski ada kendala waktu.
4. Secara umum, program bantuan sosial berhasil memenuhi kebutuhan dasar masyarakat kurang mampu. Meskipun manfaat jangka pendek dirasakan,

penting adanya program lanjutan untuk pemberdayaan ekonomi. Pengelolaan data dan evaluasi program perlu diperbaiki agar keberlanjutan dan transparansi tercapai, sehingga program ini dapat meningkatkan kesejahteraan secara lebih berkelanjutan.

5. Program bantuan sosial memberikan perubahan nyata dalam kualitas hidup masyarakat dengan membantu pemenuhan kebutuhan pokok dan pendidikan. Kendati ada tantangan seperti masalah geografis dan koordinasi antar instansi, upaya untuk memperbaiki distribusi dan memastikan bantuan tepat sasaran menunjukkan potensi program ini untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kemandirian ekonomi di masa depan.

Berdasarkan beberapa indikator efektivitas, secara umum program bantuan sosial di Kecamatan Libureng dapat dinilai cukup efektif dalam memberikan manfaat langsung bagi masyarakat kurang mampu. Keberhasilan program ini terlihat dari kontribusinya dalam membantu pemenuhan kebutuhan dasar dan meringankan beban ekonomi masyarakat. Meski begitu, berbagai tantangan seperti keterlambatan distribusi, ketidaktepatan sasaran, dan kurangnya akurasi data penerima menunjukkan bahwa efektivitas program ini masih dapat ditingkatkan melalui perbaikan sistem pendataan, distribusi, dan evaluasi pelaksanaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas program bantuan sosial di Kecamatan Libureng:

1. Pemerintah perlu meningkatkan keakuratan data penerima bantuan sosial melalui pemanfaatan teknologi berbasis real-time dan validasi berkala. Dengan demikian, bantuan dapat lebih tepat sasaran, distribusi berjalan lancar, dan hambatan administratif maupun logistik dapat diminimalkan. Selain itu, penting untuk memperkuat koordinasi antarinstansi agar program bantuan sosial tidak hanya efektif dalam jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan dengan dampak yang lebih luas bagi pemberdayaan masyarakat.
2. Masyarakat penerima manfaat diharapkan lebih proaktif dalam memberikan informasi akurat terkait kondisi sosial-ekonomi mereka, serta berpartisipasi dalam kegiatan edukasi yang diselenggarakan oleh pendamping program. Hal ini penting agar bantuan dapat dimanfaatkan secara optimal, tidak hanya untuk kebutuhan mendesak, tetapi juga sebagai langkah awal menuju kemandirian ekonomi. Dengan kerja sama aktif antara masyarakat dan pemerintah, efektivitas program bantuan sosial dapat lebih ditingkatkan.
3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan mengevaluasi program bantuan sosial di berbagai wilayah dengan kondisi geografis dan sosial yang beragam. Selain itu, pendekatan kuantitatif yang dilengkapi analisis kualitatif mendalam dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait efektivitas program. Studi lebih lanjut juga dapat difokuskan pada pengaruh jangka panjang bantuan sosial terhadap pemberdayaan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anis, I., Usman, J., & Arfah, S. R. (2021). Efektivitas Program Pelayanan Kolaborasi Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa. *E-Journal UNIMUS*, 2, 3, 1105–1116.
- Adventy, M. I. Y., Permatasari, I., Nengyanti, N., & Rafinzar, R. (2023). Inovasi Model Kebijakan Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Kemahasiswaan: Suatu Tinjauan Literatur. *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik*, 4(2).
- Azzahra, A. S., Safitri, D., & Sujarwo. (2024). Peran Program Bantuan Sosial Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Jawa Tengah: Studi Kasus Program Keluarga Harapan (PKH) Di Jawa Tengah. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2).
- Bahar, J., Agussalim, A., & Fitrianti, R. (2022). Analisis Faktor-Faktorkemiskinan Di Daerah Kabupaten: Kasus Kabupaten Bone. *Development Policy And Management Review (DPMR)*, 2(1), 46–65.
- Badan Pusat Statistik. (2022). Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Menurut Provinsi Dan Daerah. Diakses 2 Juni 2022 Dari
- Badan Pusat Statistik (2024). Presentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi Di Indonesia. Retrieved February 12, 2024, From Bps.Go.Id
- Badan Pusat Statistik. (2024). Kemiskinan Dan Ketimpangan.
- Creswell, J. W. (2014). A Concise Introduction To Mixed Methods Research - International Student Edition. *Sagepub*, 1973, 247–256.
- Djabar, D. A., Olilingo, F. Z., & Santoso, I. R. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Lonuo Kecamatan Tilingkabila Kabupaten Bonebolango. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Danbisnis*, 10(2), 581-588.
- Engka, A. R., & Natsir, N. (2024). Efektivitas Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Di Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 315–325.
- Fardi, M., Inka Nusamuda Pratama, Darmansyah, & Amil. (2023). Transparansi Pendataan Program Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Lingkungan Bebidas Kelurahan Pegesangan Kota Mataram. *Journal Of Social And Policy Issues*, 3, 150–155
- Fuaddah, A., & Fridayne, R. (2023). Literasi Digital Masyarakat Sebagai Respon

- Persoalan Bantuan Sosial Yang Tidak Tepat Sasaran (Studi Kasus Di Kelurahan Memberikan Bantuan Kepada Masyarakat Yang Mengalami Risiko Sosial. Bantuan Yang Kelompok Maupun Masyarakat Dengan Kategori Finansial K. *Jurnal Paradigma*, 4(2), 74–82.
- Harahap, S. (2020). *Penelitian Kualitatif*.
- Ii, B. A. B. (N.D.). *Efektivitas Program Bab 2*. 12–44.
- Indawati, R. (2022). Efektivitas Penyaluran Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar. *Jurnal Administrasi Negara*, 28 (1), 24–
- Jannah, R. (2019). *Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Rawaterate Jakarta Timur*. 1–19.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2020). (N.D.).
- Kemuja, S., Muhammad Ikhsan, H., Gusmita, E., & Nusantara Sakti Sungaipenuh, S. (2022). Pengaruh Tingkat Pendidikan Formal Dan Lingkungan Kerja Terhadap Efektivitas Kerja Kepala Desa Se-Kecamatan Depati Tujuh. *Maha*, 3(4), 14–21.
- Khoerunisa, F., Widiastuti, N., Studi Pendidikan Masyarakat, P., Siliwangi, I., & Barat, J. (2023). Dampak Program Bantuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Desa Cisero. *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 6(2), 174–189.
- Luthfi, M. (2019). Efektifitas Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Margajaya Kecamatan Ngamprah KBB). *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 2(1), 81
- Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, A. (2014). TUNIKOM_Fajri. *Paper Knowledge. Toward A Media History Of Documents*, 7–8.
- Myvara, V., & Wibawani, S. (2024). Efektivitas Penerapan E-ABK Dalam Menganalisis Beban Kerja Pegawai Di RSUD Dr. Mohamad Soewandhie Kota Surabaya. *VISA: Journal Of Vision And Ideas*, 4(3), 1942-1956.
- N Mustari Branding Pariwisata Dalam Pengembangan Objek Wisata Di Kabupaten Majene DOI : 10.14710/ Jiip.V6i2.11912
- N Tahir, Haerana, Ahmad Harakan Pendampingan Pengolahan Limbah Plastik Minuman Kemasan Menjadi Kerajinan Tangan
File:///C:/Users/USER/Downloads/Supriyadi,+3791+(49-54).Pdf
- Noerkaisar, N. (2021). Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah Untuk Mengatasi Dampak Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 2(1), 83–104.
- Oleh, M., Itu, K., Blt, P., Desa, D., Untuk, D., Masyarakat, M., Dan, M., Dari, R., Pandemi, D., Pelaksanaannya, C.-D., Blt, P., Jawab, P., Tujuan, S., Penelitian, D., Adalah, I. N. I., Mencari, U., Yaitu, L., Masalah, P.,

- Pencairan, J., ... Masyarakat, K. (2022). *Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Department Of Public Administration, Faculty Of Social And Political Sciences* ,. 14(1), 335–350.
- Palili, M. G. I., Indriasari, R., Kartini, D. E., & Mendrofa. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Cibeureum Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Pendidikan Tambusa*, 8(1), 7746–7754.
- Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*. (2019). Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Rahmadi, M. (2022). *Efektivitas Dana Bantuan Langsung Tunai (Blt - Dd) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin Yang Terdampak Covid-19 Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Sibreh Keumudee Aceh Besar)*.
- Rahman, Z., & Malawat, S. H. (2021). Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Bagi Masyarakat (Studi Di Kelurahan Pelambuan Kota Banjarmasin). *Eprints Universitas Islam Kalimantan*, 1–9
- Revandi, A. (2021). *Forum Diskusi Modul Tematik Tujuan Pemberian Bansos*.
- Rusliadi Potensi Dan Kontribusi Umkm Mete Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Banyusokah Ketapang Sampang
File:///C:/Users/USER/Downloads/Artikel+Ekonomi+RUSLIADI+(Investi).Pdf
- Sary, S. N., Widiyanto, M. K., & Rahmadanik, D. (2024). Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Di Kota Surabaya Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Relasi Publik*, 2(3), 310-321
- Saputro, R. R. C. (2020). *Analisis Gaya Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Efektivitas Kinerja Karyawan Di Doremi Home Music Course Ponorogo*.
- Steers, R. M. (1977). *Organizational Effectiveness: A Behavioral View*. Santa Monica, CA: Goodyear Publishing Company. (N.D.)
- Sugyono. (2015). *Teknik Pengumpulan Data*.
- Sutrisno, E. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusi*
- Weiss, C. H. (1998). *Evaluation: Methods For Studying Programs And Policies*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. (N.D.).
- Yusuf, R., Hendawati, H., & Wibowo, L. A. (2020). *Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Di Era Pandemi Covid- 19: 1(2)*, 506–515.
- Zakiyah, N., Oktavia, L., Khairiyah, F., & Iman, M. A. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat

Terdampak Covid-19 Di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 97.





Gambar 1: Rumah Penerima Bantuan PKH



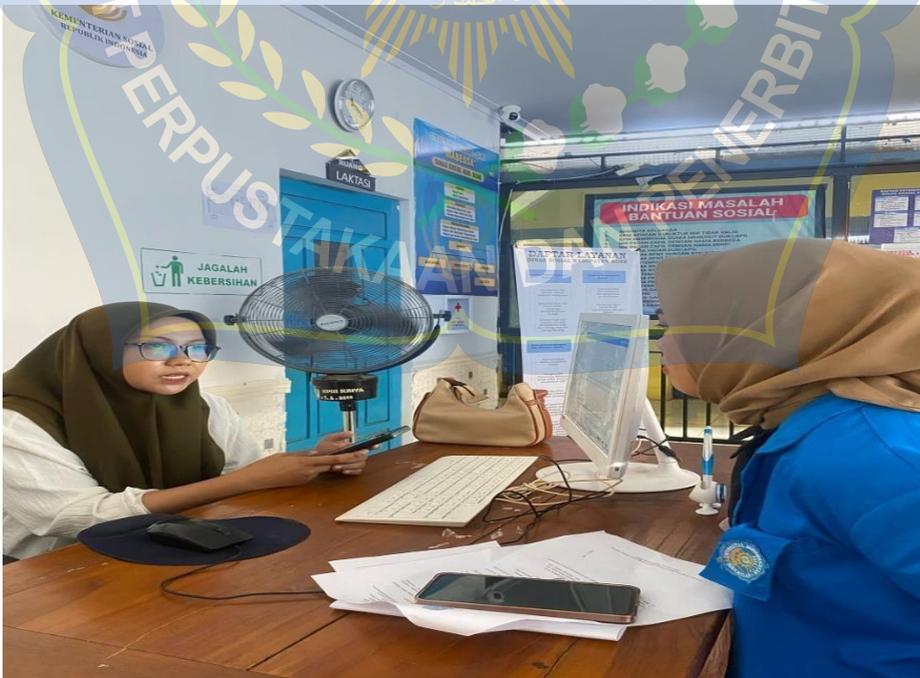


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
KARAS
FAKULTAS HUKUM
JURUSAN HUKUM PERDATA
KAMPUS DAKA

Gabar 2 : Wawancara dengan Bapak Drs. Muhamamd Idhan, M.Si



Gambar 3 : wawancara dengan ayu puspita sari S.Sos



Gambar 4 : wawancara dengan bapak muh. Rakib, S.Pd



Gambar 5 : Proses penyaluran bantuan sosial PKH





LAMPIRAN 1 : Surat Permohonan Izin Dari LP3M Ke Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan

 **MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 0866972 Fax (0411)065588 Makassar 90221 e-mail lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 5024/05/C.4-VIII/IX/1446/2024 25 September 2024 M
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 22 Rabiul awal 1446
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di -
Makassar

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0988/FSP/A.1-VIII/IX/1446/2024 tanggal 25 September 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **HASTUTI**
No. Stambuk : **10561 1115521**
Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**
Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KURANG MAMPU DI KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 1 Oktober 2024 s/d 1 Desember 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

اِنَّكَ اَعْلَمُ بِمَا تُرْسِلُ رُسُلَكَ

Ketua LP3M,

Mun. Arief Muhsin, M.Pd.
NBM 1127761

STAKAAN

CS Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN 2 : Surat Izin Penelitian Dari DPMPTSP Ke Walikota Makassar



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor : **24857/S.01/PTSP/2024** Kepada Yth.
 Lampiran : - Bupati Bone
 Perihal : **Izin penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 5204/05/C.4-VIII/IX/1446/2024 tanggal 25 September 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **HASTUTI**
 Nomor Pokok : 105611115521
 Program Studi : Ilmu Adm. Negara
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
 Alamat : Jl. Sit Alauddin, No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KURANG MAMPU DI KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **01 Oktober s/d 01 Desember 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada Tanggal 25 September 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

 **ASRUL SANI, S.H., M.Si.**
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
 1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar,
 2. *Pertinggal.*

LAMPIRAN 3: Surat izin penelitian dari DPMPTSP Kabupaten bone



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
 Jalan Petta Ponggawae No. 4, Watampone, Bone, Sulawesi Selatan,
 Telepon (0481) 25056, Faximile (0481) 25056,
 Laman <https://dpmptsp.bone.go.id/>, pos-el dpmptspbone@gmail.com

IZIN PENELITIAN

Nomor: 070/12.1199/IX/IP/DPMPSTSP/2024

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a : HASTUTI
NIP/Nim/Nomor Pokok : 105611115521
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Tompo Bulu Kec. Libureng
Pekerjaan : Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Makassar

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :
 "EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
 MASYARAKAT KURANG MAMPU DI KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE"

Lamanya Penelitian : 01 Oktober 2024 s/d 01 Desember 2024

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bone, Kepala Desa Tompo Bulu Kecamatan Libureng Kabupaten Bone
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 27 September 2024

KEPALA DINAS,



Drs. ANDI AMRAN, M. Si
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19681122 198908 1 001

Rp.0.-

Tembusan Kepada Yth.:

1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone di Watampone.
2. Arsip.

LAMPIRAN 4 : Surat Keterangan Selesai Meneliti Dari Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bone



PEMERINTAH KABUPATEN BONÈ
DINAS SOSIAL

*Alamat : Jalan Andalas No. 49 Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanetè Rjattang Barat
Watampone Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos 92732 No. Telp. /No. Faks. (0481) 21029
Email: dinas.kesos.kabbone@gmail.com*

SURAT KETERANGAN
Nomor : 460/193/X/2024/Dinsos

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: ANDI RAHMATULLAH , STP.,M.SI
NIP	: 197909061999121001
Pangkat/Golongan	: PEMBINA Tk.I,IV/b
Jabatan	: SEKRETARIS Dinas Sosial Kabupaten Bone

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: HASTUTI
NIM/No. Pokok	: 1056000015521
Tempat/Tgl. Lahir	: BAKKANIE, 04 MEI 2003
Jenis Kelamin	: PEREMPUAN
Agama	: ISLAM
Prodi	: ILMU ADMINISTRASI NEGARA
Fakultas	: ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Universitas/PT	: UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Alamat	: DESA TOMPO BULU KEC. LIBURENG

Telah benar-benar melaksanakan Penelitian pada Dinas Sosial Kabupaten Bone dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul **"EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KURANG MAMPU DI KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE"** terhitung mulai tanggal 01 Oktober s/d 01 Desember 2024

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 15 Oktober 2024
a.n. Kepala Dinas Sosial Kab. Bone


ANDI RAHMATULLAH S.STP.,M.SI
Pangkat: Pembina Tk.I,IV/b
NIP: 197909061999121001



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Hastuti
Nim : 105611115521
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	23 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	4%	10 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 09 Januari 2025

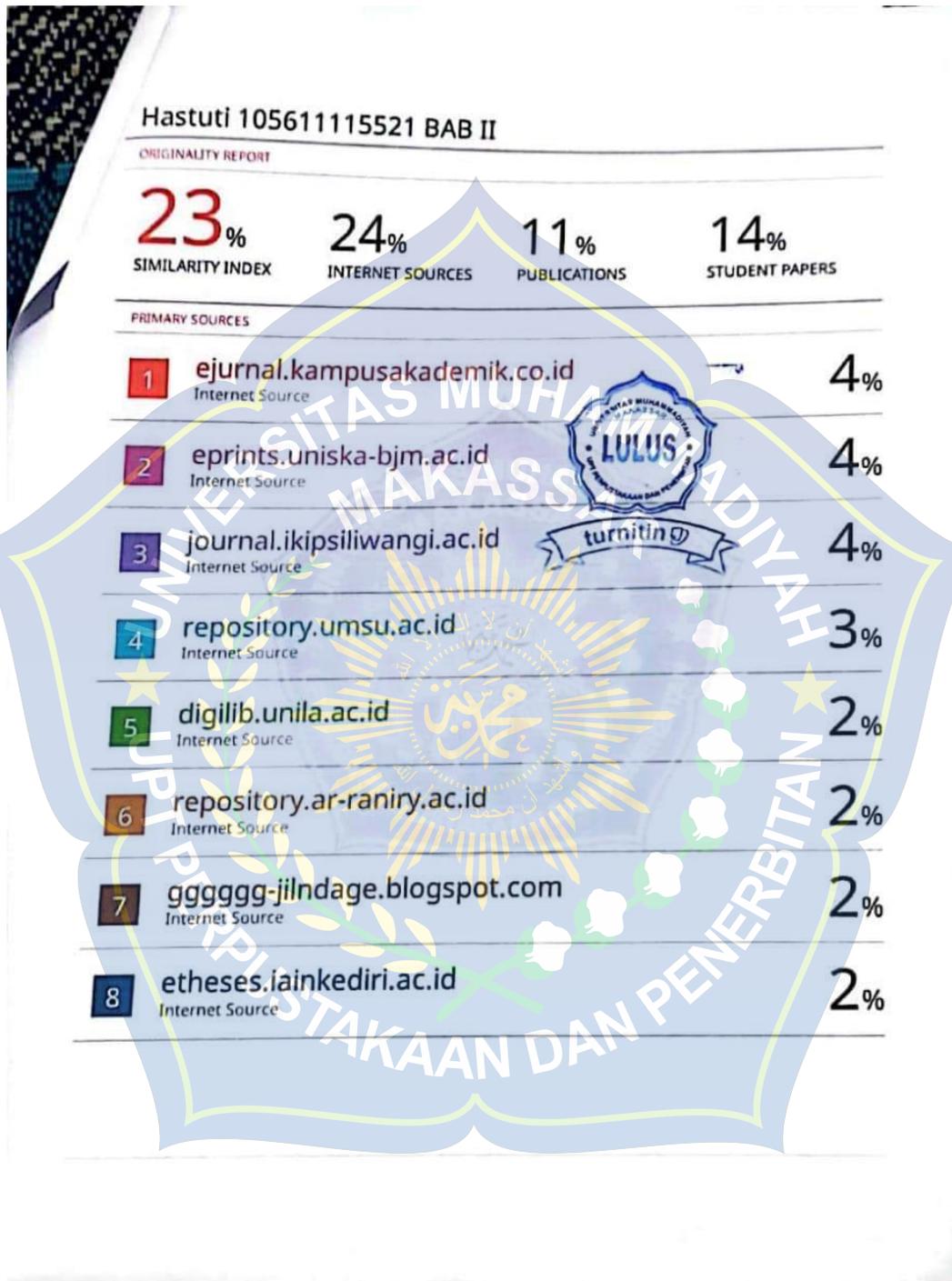
Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Mursihah S. Jum, M.I.P.
NBM. 964 591







Hastuti 105611115521 BAB III

ORIGINALITY REPORT

9%	6%	9%	7%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Abdah Munfaridatus Sholihah. "INOVASI KURIKULUM: STUDI KASUS DI MADRASAH ALIYAH AL-ISLAM JORESAN MLARAK PONOROGO", Al-Adabiya: Jurnal Keperguruan dan Keagamaan, 2020 Publication	2%
2	Sindy Kartika, Frans Aditia Wiguna. "IMPLEMENTASI KEDISIPLINAN DI SDN SUKORAME 2 SEBAGAI BEKAL MEMBENTUK PENDIDIKAN KARAKTER PADA SISWA", JURNAL PENDIDIKAN DASAR NUSANTARA, 2020 Publication	2%
3	digitallib.iainkendari.ac.id Internet Source	2%
4	Aulia Al Qori Hadistiyah, Rio Johan Putra. "Efektivitas Pelaporan Pajak Di Indonesia", Owner, 2022 Publication	2%
5	Submitted to President University Student Paper	2%

CS
Dipindai dengan CamScanner



Hastuti 105611115521 BAB V

ORIGINALITY REPORT

4%	4%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.umy.ac.id Internet Source	2%
2	database.forda-mof.org Internet Source	2%

Exclude quotes Off Exclude matches Off
Exclude bibliography Off



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Hastuti atau yang lebih dikenal dengan nama tuti lahir di Bakkanie Bone Sulawesi Selatan, pada tanggal 04 mei 2003. Anak ke 3 dari 4 bersaudara, lahir dari pasangan suami istri Nurdin dan Malang. Penulis mulai menempuh pendidikan di SD 187 Tompo bulu yang berada di bone sulawesi selatan dan selesai pada tahun 2014, penulis melanjutkan pendidikan di MTS DDI NURANNAS Sulawesi Selatan dan selesai pada tahun 2017, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MA DDI NURANNAS Bone Sulaesi Selatan dan selesai pada tahun 2020. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi di universitas muhammadiyah makassar pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik dengan program studi ilmu administrasi negara. Pada tahun 2025 penulis berhasil mempertanggung jawabkan hasil karya ilmiah di depan penguji yang berjudul “Efektivitas program bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone “ dan mendapatkan gelar S.AP.